

**PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
PEMBANGUNAN PASAR DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN
JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana SI Dalam Ilmu Dakwah

Oleh

SARAH HALIMAH

1441020185

Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H /2020M**

**PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
PEMBANGUNAN PASAR DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN
JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi



Pembimbing I : Dr. Jasmadi, M.Ag
Pembimbing II : Drs. Mansur Hidayat, M.Sos.I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H / 2020 M**

ABSTRAK

PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMBANGUNAN PASAR DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**Oleh
Sarah Halimah**

Kehidupan manusia tidaklah terlepas dari usaha-usaha ekonomi, dimana usaha ekonomi merupakan tanda-tanda adanya kehidupan. Semakin maju kebudayaan mengakibatkan tingkah laku perekonomian akan semakin sulit dan rumit. Oleh sebab itu pemerintah Desa dalam menanggulangi perekonomian masyarakat dengan merapihkan pasar agar ditata dengan baik. Pembangunan menimbulkan perubahan yang turut mempengaruhi tingkat keseimbangan manusia dan lingkungan hidup sehingga menimbulkan berbagai akses negatif, Maka perlu diterapkan pengawasan yang ketat untuk mencegah berkembangnya akses negatif ini menjadi liar. Selain diterapkannya pengawasan penyelesaian masalah harus menggunakan mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Keadaan seperti ini terjadi pada masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dimana masyarakatnya memiliki konflik terkait relokasi pasar yang tidak sesuai dengan perjanjian namun permasalahan ini dapat dimusyawarahkan dengan baik, musyawarah dilakukan sebanyak tiga kali dan menghasilkan sebuah kesepakatan yaitu pembangunan pasar terus berjalan karena pembangunan mendapatkan dukungan masyarakat namun sebagian masyarakat tidak mendukung terhadap pembangun tersebut.

Penulis mengadakan penelitian mengenai pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik pembangunan pasar di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dengan rumusan masalah: Bagaimana implementasi pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik pembangunan pasar Di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab.Lampung selatan? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik pembangunan pasar Di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab.Lampung selatan, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive saampling, sehingga memperoleh 13 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah dianalisis dengan metode induktif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, didapat temuan sebagai berikut: untuk menyelesaikan sebuah konflik dilakukan sebuah musyawarah antara aparat desa dengan masyarakat Desa Karang Anyar, musyawarah ini dilakukan sebanyak tiga kali dengan menghasilkan sebuah kesepakatan-kesepakatan yang memihak kepada masyarakat.

Kata kunci: pendekatan partisipatif, konflik pembangunan pasar.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warohmatullhi Wabarokatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarah Halimah
NPM : 1441020185
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ” **Pendekatan Partisipatif dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Pasar di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung,
Penulis

Sarah Halimah
NPM.1441020185

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK PEMBANGUNAN PASAR DI DESA KARANG
ANYAR KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

Nama : **Sarah Halimah**
Npm : **1441020185**
Jurusan : **Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

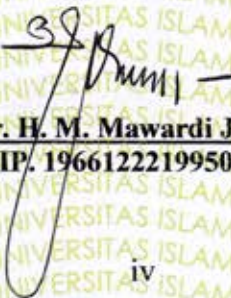
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jasmadi, M.Ag
NIP.196106181990031003


Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I
NIP.196508171994031005

Ketua Jurusan
Pengembangan Masyarakat Islam


Dr. H. M. Mawardi J., M.Si
NIP. 196612221995031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Judul Skripsi “ **PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMBANGUNAN PASAR DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**”,
NPM. 1441020185, Jurusan: **Pengembangan Masyarakat Islam**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

KetuaSidang : Dr. H. M. Mawardi J., M.Si

(.....)

Sekretaris : Fiqih Satria, M.T.I

(.....)

Penguji I (Utama) : Hj. Mardiyah, S.Pd., M.Pd

(.....)

Penguji II (Kedua) : Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.A

NIP. 196104091990031002

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat ayat 10)



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Zainul Karim dan Ibu Cucu Rosita, atas pengorbanan selama ini sejak masih dalam kandungan sampai usia sekarang, yang tidak pernah lelah dan bosan dalam bekerja dan berdo'a untuk anak-anaknya, hanya Allah yang bisa membalas segalanya.
2. Adikku, Lana Lutfia yang selalu memberikan dorongan dan mendoakan dalam keberhasilan studiku.
3. Penulis tak lupa berterimakasih kepada Saudara Rezza Ariefianto S.T atas setiap doa dan dukungan serta yang selalu memberikan motivasi, semangat demi keberhasilanku.
4. Untuk sahabatku yang sudah hadir dalam suka maupun duka yang selalu mendukung disetiap langkahku, Lisa Fitriana, S.Pd., Any Siti Purhayani, S.Sos., Amalia, S.E., Ficayani, S.Sos., Adella Putri, S.H., yang telah membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu (Guru dan Dosen) yang selalu mengajarkan berbagai ilmu dengan ikhlas, semoga ilmu yang diberikan selama ini berkah dan bermanfaat serta menjadi amal jariyah bapak dan ibu semua.
6. Sahabat dan Teman-teman seperjuangan di PMI angkatan 2014 khususnya PMI C, Romadhon fadilah, S.Sos., Rizky Yulda ningsi, S.Sos., Yuni kurniati, S.Sos., Uswatun Hasanah, S.Sos., yang saling menyemangati dan berjuang bersama, terus semangat dalam berkarya.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Sarah Halimah dilahirkan di Tasikmalaya Jawa Barat , 25 Januari 1996 .Penulis merupakan anak sulung dari dua bersaudara pasangan Bapak Zainul Karim dan Ibu Cucu Rosita yang telah melimpahkan kasih sayang serta memberikan pengaruh dalam perjalanan hidup penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan program sarjana S1.

Pendidikan formal dimulai dari tingkat:

1. TK Permata, Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, lulus pada tahun 2001.
2. SD Negeri 1 Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, lulus pada tahun 2007.
3. SMP Negeri 3 Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, lulus pada tahun 2010.
4. SMK Negeri 5 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013.
5. Mulai tahun 2014 penulis melanjutkan ke program pendidikan SI di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang mana telah memberikan kenikmatan begitu besar kepada kita semua. Tidak ada sedikit perjuangan pun yang luput dari pengawasan-Nya, karena Dia-lah sang pengatur jiwa-jiwa kita. Semoga keberkahan senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada sang tauladan sejati, pembawa risalah yaitu Rasulullah nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua diberikan syafaatnya dihari kiamat.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah bentuk dari Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang penelitian untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dan Allhamdulillah penulis telah menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penulis menyadari bahwa dalam upaya penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr.H. M. Mawardi J, M.Sos.I selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Bapak H. Zamhariri S.Ag. M,Sos.I selaku Sekretaris Jurusan
3. Bapak Dr. Jasmadi, M.Ag Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Mansur Hidayat M.Sos.I selaku pembimbing II sekaligus sebagai pembimbing akaademik dari semester 1-8 yang telah mengarahkan selama perjalanan kuliah

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan yang telah membantu dan membina penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
6. Bapak Sumanto selaku pemerintah desa berserta Anggota dan Masyarakat sekitar atas izin dan kerjasama yang diberikan selama penulis mengadakan penelitian
7. Teman-teman seperjuangan PMI Angkatan 2014 yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada semua pihak yang telah turut memberikan dukungan sehingga terselesainya skripsi ini dengan lancar, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT. Melimpahkan pahala kepada semua pihak yang bekerjasama dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Desember 2019

Sarah Halimah
NPM. 1441020185

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Teknik Analisis Data	21
H. Penelitian Terdahulu.....	23
 BAB II PARTISIPATIF MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN KONFLIK	
A. Pendekatan Partisipatif	27
1. Pengertian Partisipatif	27
2. Bentuk Bentuk Partisipatif	28
3. Tingkatan Partisipatif.....	39
4. Metode Partisipatif.....	30
5. Pendekatan Partisipatif Dalam Penyelesaian Konflik.	32
B. Penyelesaian Konflik.....	35
1. Pengertian Konflik.....	35
2. Bentuk Bentuk konflik.....	39
3. Konflik Dalam Pembangunan Pasar	40
4. Penyelesaian Konflik	43
C. Pembangunan Pasar.....	46
1. Pengertian Pembangunan Pasar.....	46
2. Fungsi Pembangunan Pasar.....	47
3. Problematika Pembangunan Pasar.....	48

BAB III GAMBARAN UMUM DESA KARANG ANYAR KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	
A. Gambaran Umum Desa Karang Anyar.....	52
1. Sejarah Berdirinya Desa Karang Anyar.....	52
2. Visi Dan Misi Desa Karang Anyar.....	53
3. Strukur Organisasi Desa Karang Anyar.....	54
4. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Karang Anyar.....	55
5. Kondisi Sosial Ekonomi	56
6. Kondisi Sosial Budaya Desa Karang Anyar	57
7. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Karng Anyar.....	59
8. Sarana Prasarana Desa Karang Anyar.	60
B. Pendekatan Partisipatif Dalam Penyelesaian Konflik	
Pembangunan Pasar Karang Anyar.....	61
1. Latar Belakang Terjadinya Konflik di Pasar Karang Anyar	61
2. Peran Dan Upaya Tokoh-tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik.	63
 BAB IV ANALISIS PENDEKATAN PARTISIPASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMBANGUNAN PASAR DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	
A. Latar Belakang Terjadinya Konflik Di Pasar Karang Anyar.....	71
B. Penyelesaian Konflik Melalui Pendekatan Partisipatif	73
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama Kepala Desa Karang Anyar	52
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	56
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	57
Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama	59
Tabel 6 Sarana dan Prasarana.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Pedoman Dokumentasi

Daftar Nama-Nama Sampel

Surat Perubahan Judul

Surat Hadir Munasqosah

Kartu Konsultasi

Surat Keterangan Survey Dari Desa

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dokumentasi



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Desa Karang Anyar	54
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memperjelas istilah pokok, dalam judul skripsi ini yang berjudul: **“Pendekatan Partisipatif Dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Pasar Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”**, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul tersebut :

Menurut Aprillia Theresia partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.¹ Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.² Pendekatan Partisipatif adalah suatu proses kegiatan yang melibatkan berbagai pihak yang terkait (stakeholder) sehingga meningkatkan kemampuan (memberdayakan) pada segala proses pembangunan.

Dari beberapa uraian di atas, yang dimaksud Pendekatan partisipatif adalah proses penyelesaian konflik yang melibatkan keikutsertaan masyarakat dan berbagai pihak terkait (stakeholder) sehingga dapat mengambil keputusan atau alternatif solusi untuk menangani masalah konflik tersebut dan dapat memberikan proses pembelajaran masyarakat dalam menyelesaikan konflik.

¹Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 198.

²Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007), h. 27.

Penyelesaian Konflik Menurut Maswadi Rauf adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Penyelesaian konflik diperlukan untuk mencegah : *pertama* semakin mendalamnya konflik, yang berarti semakin tajamnya perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik. *Kedua* semakin meluasnya konflik, yang berarti semakin banyaknya jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik yang berakibat konflik semakin mendalam dan meluas, bahkan menimbulkan disintegrasi masyarakat yang dapat menghasilkan dua kelompok masyarakat yang terpisah dan bermusuhan.³

Menurut Peneliti penyelesaian konflik yaitu suatu cara-cara untuk menghilangkan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Di dalam penelitian ini menggunakan penyelesaian konflik secara persuasif, yaitu menggunakan perundingan dan musyawarah (mediasi).

Pembangunan merupakan kegiatan yang selalu terus menerus untuk dilakukan, tujuan dari pembangunan adalah untuk memberikan perubahan kepada masyarakat, terutama untuk menciptakan kesejahteraan. Menurut S.P. Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa.⁴ Menurut Bintoro Tjokroamidjojo pembangunan merupakan suatu usaha

³Maswadi Rauf (2001) *Konsensus dan konflik politik*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. h 8

⁴Siagian, Sondang P (2007) *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta, Gunung Agung. h.2

perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang di anggap lebih baik (lebih diinginkan) ⁵

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli dan bisnis, Katabisnis berasal dari bahasa Inggris ,*business (biznes)*, artinya perusahaan atau usaha, seperti ungkapan "*the grocery business*" artinya perusahaan sayur-sayuran.⁶ Secara umum pengertian pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi mereka yang aktual atau potensial, menetapkan harga suatu produk atau sekumpulan produk.⁷ Dalam pengertian lain pasar merupakan tempat penjual dan pembeli bertemu untuk membeli atau menjual sumberdaya, barang, dan jasa.⁸

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud judul skripsi “Pendekatan Partisipatif Dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Pasar Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan” adalah suatu cara penyelesaian konflik dengan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan atau alternatif solusi untuk menangani masalah konflik terkait relokasi pasar Desa Karang Anyar.

⁵ Bintoro Tjokroadmidjojo, *pengantar administrasipembangunan LP3ES, Cet. Ke-3* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hal.189

⁶ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1984), h. 90.

⁷ ORobert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, terj. Aldi Jenie, (Jakarta: Prenhallindo, 1999), Jilid 1, h.9

⁸ Richard A. Bilas, *Microeconomic Theory*, terj. Gunawan Hutaauruk. (Jakarta: Erlangga, 1995), eet. Ke-II, h.5

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih judul ini adalah sebagai berikut

1. Konflik berdampak negatif terhadap pembangunan. Kenyataan nya dalam pembangunan pasar disana konflik yang terjadi yaitu menjadi hambatan dalam pembangunan pasar. Konflik harus diselesaikan salah satunya melalui pendekatan-pendekatan. Dari beberapa model pendekatan yang sering banyak di terapkan atau digunakan adalah mediasi.

Ini merupakan langkah yang baik dalam pemecahan konflik pembangunan pasar. Karena penyelesaian dengan menggunakan mediasi merupakan langkah yang efektif untuk penyelesaian konflik. mediasi adalah bentuk proses penyelesaian pihak yang bertikai mencapai penyelesaian yang menggunakan pihak ketiga yang netral (mediator). Adapun persamaan advokasi dan mediasi yaitu : Advokasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu penegakan hukum melalui upaya yang terorganisir untuk melaksanakan Undang-Undang dan Penegakan hukum secara adil dan demokratis. Sedangkan mediasi Mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengakhiri sengketa dan menemukan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

2. Lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, serta tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penelitian, yang memudahkan peneliti dalam mencari dan mendapatkan informasi yang

dibutuhkan. Sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidaklah terlepas dari usaha-usaha ekonomi, dimana usaha ekonomi merupakan tanda-tanda adanya kehidupan. Semakin maju kebudayaan mengakibatkan tingkah laku perekonomian akan semakin sulit dan rumit. Dengan demikian untuk menjalankan suatu kegiatan usaha akan penuh dengan tantangan dan rintangan baik yang datang dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Pemerintah Desa dalam menanggulangi perekonomian bagi masyarakat membuat pasar-pasar agar ditata dengan baik agar terwujud seperti yang dirumuskan dalam tujuan negara kita untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, seperti halnya Pemerintah Desa Karang Anyar memberikan kesempatan bagi masyarakat khusus pedagang melakukan aktivitasnya⁹.

Dari sisi ekonomi, semakin meningkatnya jumlah pusat perdagangan baik yang tradisional maupun modern mendorong terciptanya peluang kerja bagi banyak orang. Mulai dari jasa tenaga satuan pengaman, penjaga toko, pengantar barang, *cleaning service*, hingga jasa transportasi. Hal ini berarti kehadiran pusat perdagangan ikut serta dalam mengentaskan masalah pengangguran dan kemiskinan. Salah satu sisi yang potensial dalam pengembangan pasar sebagai sarana tempat berdagang adalah pemerintah Desa dimana pasar tersebut terdapat.

⁹ Josef Riwu Kaho, *Analisis Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hal. 88

Karena dalam hal ini para pedagang yang menempati pasar dapat memberikan kontribusi pemasukan bagi kas pemerintah desa yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana diterangkan didalam Peraturan Daerah tingkat II Kota Madya Lampung No. 3 Tahun 1987 tentang susunan organisasi PD. Pasar adalah pelaksana teknis pemerintah daerah dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pasar-pasar di desa.

Perencanaan pembangunan desa masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan dari masa ke masa dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa di masa orde lama, orde baru dan masa reformasi. Di wilayah desa, peran pemerintah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa beserta aparat desa lainnya. Peran pemerintah desa sangat penting sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia.

Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa masa depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.¹⁰Pembangunan merupakan kegiatan yang selalu terus menerus untuk dilakukan, tujuan dari pembangunan adalah untuk memberikan perubahan kepada masyarakat, terutama untuk menciptakan kesejahteraan.

Pembangunan menimbulkan perubahan, sehingga turut mempengaruhi tingkat keseimbangan manusia dan lingkungan hidup. Perubahan keseimbangan manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dapat menimbulkan berbagai akses negatif, maka perlu diterapkan pengawasan yang ketat untuk mencegah berkembangnya akses negatif ini menjadi liar. Akses negatif yang dihasilkan dari pembangunan dapat diselesaikan dengan cara mediasi, baik melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpaidalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui prosesperundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu olehmediator.”¹¹

Desa Karang Anyar merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Desa Karang Anyar memiliki luas \pm 4. 810 Ha, wilayah tersebut cukup luas sehingga terjadi

¹⁰Tjokroamidjojo, Bintoro. (1985) *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta, Haji Masagung. hal 113

¹¹Dalam Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor.1 Tahun 2008 disebutkan *bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.*

pemukaran menjadi 11 Desa. Pemerintah Desa Karang Anyar berupaya meningkatkan perkonomian masyarakat dengan cara merelokasi pasar agar menjadi lebih baik, lebih rapih dan lebih nyaman sehingga dapat menarik minat pengunjung atau pembeli untuk berbelanja. Relokasi ini dilakukan karena pasar yang lama terlihat tidak rapih dan terkesan kumuh, serta kepemilikan lahan pasar lama dipegang oleh pesorangan yaitu dimiliki oleh lima orang pemilik tanah. Oleh sebab itu pemerintah desa mengadakan program relokasi pasar agar masyarakat Desa Karang Anyar memiliki pasar sendiri yang rapih dan nyaman.¹²

Relokasi dapat diartikan yakni penataan ulang tempat yang baru dengan pemindahan dari tempat lama ketempat yang baru. Dalam relokasi adanya obyek dan subyek yang terkena pajak dalam perencanaan dan pembangunan lokasi. Relokasi dilakukan pemerintah agar desa menjadi bersih dan tertata rapi, namun disisi lain pemerintah desa harus mempersiapkan lahan sebagai tempat tempat relokasi pasar yang baru. Desa karang anyar memiliki sepetak tanah lapangan bola (lapangan beringin) yang berukuran 1 H (Hektare) tanah tersebut dibeli dengan cara iuran atau gotong royong oleh seluruh masyarakat desa karang anyar pada tahun 1988 menurut tokoh pemuka agama masing masing dusun Desa Karang Anyar. Dalam hal ini terjadilah sengketa lahan antara tokoh pemertahan tanah lapangan (kelompok tua) dan pemerintah Desa (kelompok muda), pemerintah desa mengabaikan keluhan atau ketidak setujuan dari sebagian kelompok masyarakat, berupa :

¹²Profil Desa Karang Anyar kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan.

1. Tidak menggunakan lapangan bola (lapangan beringin) sebagai relokasi pasar
2. Tidak menjadikan pasar sebagai sarana politik dan kepentingan golongan tertentu.

Kedua keluhan masyarakat di abaikan pemerintah desa sehingga pemerintah desa tetap melanjutkan pembangunan pasar yang baru dengan membagi lahan lapangan bola (lapangan beringin) menjadi 2 bagian, setengah untuk lapangan bola dan setengah untuk pembangunan pasar.

Pada tahun 2014 Desa Karang Anyar mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah sebagai dana Desa. Pemerintah Desa melanjutkan pembangunan pasar dengan menggunakan dana tersebut yang cukup besar dan apabila pasar tidak jadi dibangun maka Desa Karang Anyar akan mendapat kerugian yang sangat besar, salah satunya adalah Desa Karang Anyar tidak akan mendapat bantuan apapun dari pemerintah dalam jangka waktu yang panjang. Dan akibat ini tidak hanya akan dirasakan oleh Desa Karang Anyar, tetapi juga semua Desa yang ada di Kecamatan Jati Agung.

Hari minggu, tanggal 26 Januari 2014 telah diadakan musyawarah Desa antara kelompok yang mempertahankan keberadaan tanah lapangan (kelompok tua) dan pemerintah desa (kelompok muda) yang bertempat di Balai Desa Karang Anyar, Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Yang dihadiri oleh Kepala Desa, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda, dan Karang Taruna Desa

Karang Anyar. Adapun pembahasan Rapat Musyawarah Desa adalah sebagai berikut , Pembangunan Pasar dan Penggeseran Lapangan Sepak Bola.

Setelah dilaksanakannya Musyawarah Desa, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut : *yang pertama*, Pembangunan pasar Desa Karang Anyar sebaiknya ditempatkan ditempat yang strategis dan jauh dari jalan raya agar tidak mengganggu kenyamanan berlalu lintas dan tidak menimbulkan kemacetan. *Yang kedua*, Dipasang instalasi dilapangan, karena lapangan setiap tahun selalu digunakan sebagai tempat sholat idul fitri, upacara kemerdekaan dan kegiatan desa lainnya. *Yang ketiga* Lapangan Desa Karang Anyar dapat dibangun lebih baik lagi, agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, dan Desa Karang Anyar bisa lebih maju. Kesepakatan tersebut adalah hasil dari kesepakatan dari kedua pihak antara kelompok tua dan kelompok muda. Dalam hal ini kedua belah pihak menyetujuinya.¹³

Pada bulan juni tahun 2015 mulailah dibangunnya pasar baru dilapangan Desa Karang Anyar awalnya berjalan dengan semestinya dan pembangunan mencapai 70%. Mengingat kesepakatan yang telah disepakati bahwasanya pemerintah Desa akan mengganti atau memindahkan lapangan bola (lapangan beringin) ketempat yang sudah disepakati kedua belah pihak pada faktanya belum terealisasi dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian munculah berbagai macam opini dari masyarakat yang mengakibatkan adanya kesalahpahaman .

¹³Dokumentasi hasil musyawarah desa pada tanggal 26 Januari 2014, dicatat pada tanggal 25 Februari 2019

Pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar 120 warga Desa Karang Anyar beramai-ramai mendatangi kantor balai Desa untuk berunjuk rasa menindak hasil kesepakatan yang telah disetujui. Dalam hal ini pembangunan relokasi pasar seketika dihentikan dan disegel oleh masyarakat yang kecewa atas kinerja Pemerintah Desa. Tanah lapangan beringin dulunya dibangun oleh masyarakat dari hasil gotong royong masyarakat, masyarakat menganggap bahwa tanah lapangan tersebut adalah tanah milik nenek moyang mereka yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan pribadi maupun suatu kelompok.

Penyegelan pasar baru membuat para pedagang kebingungan, para pedagang tidak bisa berjualan ditempat yang sudah di segel dan pedagangpun tidak bisa berjualan di pasar lama dikarenakan pasar lama sudah dibongkar. Permasalahan tersebut membuat pedagang dan pembeli tidak beraturan dan pendapatan merekaupun berkurang.¹⁴

Hari minggu tanggal 19 Juli tahun 2015 tepat setengah bulan dari tragedi demo, masyarakat datang kembali ke Kantor Balai Desa untuk mengaspirasikan kekecewaannya dan ketidak setujuannya atas tetap dibangunnya pasar baru tersebut. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober tahun 2015, telah diadakan kembali musyawarah desa yang bertempat di Balai Desa Karang Anyar, Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Yang dihadiri oleh perwakilan Kec. Jati Agung, Forkopimcam Jati Agung, Kepala Desa, Aparatur Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Warga Desa Karang Anyar serta perwakilan Disperindag Kab. Lampung Selatan,

¹⁴ H. Kerdi, Pengurus Pasar Desa Karang Anyar, wawancara dengan penulis, Desa Karang Anyar, 25 Februari 2019

Dinas PU, Kontraktor Pembangunan Pasar. Setelah dilaksanakannya Musyawarah Desa, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menyepakati pembangunan Desa Karang Anyar yang dibangun diatas lapangan.
2. Menyetujui dan menyepakati tentang penggeseran lokasi lapangan ketempat yang baru.
3. Kepala dusun bertanggung jawab penuh atas persetujuan pembangunan pasar dan penggeseran lapangan kepada masyarakat diwilayah dusun masing-masing.
4. Apabila selama pelaksanaan pembangunan pasar dan penggeseran lapangan ada sekelompok atau oknum warga Desa Karang Anyar berupaya menghambat dan mengganggu pelaksanaan pembangunan tersebut, maka akan dianggap sebagai provokator dan akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Dengan demikian hasil dari mediasi ke2 (dua) antara tokoh pro dan kontra atas pembangunan relokasi pasar baru Desa Karang Anyar. Pemerintah Desa dibantu oleh pemerintah daerah melanjutkan pembangunan relokasi pasar baru yang telah tertunda sebelumnya akibat masalah ini.

Dalam hal ini pemerintah daerah ikut membantu dalam pelaksanaan pembangunan pasar karna dalam pemerintah desa terdapat unsur politik yang merugikan masyarakat maupun desa oleh kelompok tertentu. Desember tahun

2016 pembangunan pasar telah selesai dan telah ditempati berdagang oleh sebagian pedagang. Hal tersebut bukanlah akhir dari masalah sengketa tanah karena sebagian pedagang atau wargapun tidak mau menempati pasar baru dan tetap menggunakan pasar yang lama untuk berjualan dengan alasan-alasan tertentu, seperti misalnya bangunannya yang kecil, ruang masuk kendaraan pedagang sempit dan harga yang cukup mahal untuk penyewaan tempat bagi pedagang dan lain sebagainya. Sehingga pembangunan Pasar Desa Karang Anyar masih terhambat dan belum beroperasi seluruhnya. Dalam hal ini kedua pasar lama dan baru dioperasikan sehingga mengakibatkan kerugian antara pedagang yang bertambah banyak sedangkan pembelinya sedikit.

Meskipun telah melalui beberapa prosedur dan musyawarah bersama namun masih banyak masyarakat yang kontra terhadap pembangunan pasar baru yang menggunakan sebagian dari tanah lapangan Desa Karang Anyar dan tak tanggung-tanggung warga pun bahkan demo ke kantor pemerintah pusat sehingga pemerintah pun sampai detik ini belum juga meresmikan pasar baru tersebut. Dalam hal ini pembangunan relokasi pasar baru masih menghadapi masalah pro dan kontra antara pemerintah Desa dan sebagian masyarakat yang mempertahankan tanah lapangan bola(lapangan beringin).

Melihat latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik yang terjadi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana implementasi pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik pembangunan pasar Di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab.Lampung selatan?”

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat menyebut bahwa penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui implementasi pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik pembangunan pasar Di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab.Lampung selatan.

2. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini peneliti dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang cara penyelesaian konflik melalui pendekatan partisipatif mediasi.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain :

1) Bagi pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran kepada kepala desa dalam upaya penyelesaian konflik yang ada di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan .

2) Bagi masyarakat

Agar masyarakat dapat menerima dan memahami tentang penyelesaian konflik melalui pendekatan partisipatif yang ada di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan .

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui suatu permasalahan agar hasil penelitian dilaksanakan dapat mencapai hasil optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termaksud penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁵ Adapun penelitian ini akan membahas tentang Bagaimana cara penyelesaian konflik pembangunan pasar menggunakan pendekatan partisipatif serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan pasar tersebut sehingga dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada.

¹⁵Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.12

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁶ Penelitian dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan variabel-variabel masalah dengan masa sekarang (sedang terjadi).¹⁷ Atau deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena.¹⁸ Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (*Perspektif Subject*) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang dimaksud populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi penulis dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Karang Anyar yang terlibat konflik dan penyelesaian

¹⁶ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 63

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), Cet. Ke VII, h. 32

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Edisi Revisi h. 245

¹⁹ Surahromo Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), Cet Ke-14, h. 109.

konflik pembangunan pasar Karang Anyar berjumlah 120 orang, pengurus desa Karang Anyar 21 orang, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang terlibat dalam penyelesaian konflik yang berjumlah 6 orang, sehingga populasi keseluruhan dalam penelitian ini berjumlah 147 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi menurut pendapat lain sampel adalah sebagian populasi atau wakil yang diteliti.²⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan metode *non random* sampling yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel.

Lebih lanjut, teknik *non random sampling* yang penulis gunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu dimana dalam *purposive sampling* pemilihan kelompok subjek di dasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²¹ Ciri-ciri sampel yang akan dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

1) Pengurus Desa Karang Anyar

- a) Jajaran pengurus Desa Karang Anyar yang mengetahui seluk beluk permasalahan pembangunan pasar.
- b) Pengurus Desa yang terlibat dalam konflik pembangunan pasar.

²⁰*Ibid*, h.145.

²¹ Sugiono, Metode Penelitian Adminitrasi, (Bandung:Alfabeta, 2001),h. 91.

- c) Pengurus Desa Karang Anyar yang ikut dalam penyelesaian konflik (yang selalu hadir / berpartisipasi dalam 2 kali pertemuan musyawarah desa).

Berdasarkan kriteria diatas dapat ditentukan sampel sebanyak 5 orang.

2) Masyarakat

- a) Masyarakat desa Karang Anyar yang terlibat dalam konflik / demonstrasi pembangunan pasar.
- b) Masyarakat desa Karang Anyar yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan 2 kali pertemuan musyawarah desa yang membahas penyelesaian konflik.
- c) Masyarakat desa Karang Anyar yang aktif dalam memberikan tanggapan di dalam forum musyawarah tersebut.
- d) Tokoh Masyarakat, tokoh Agama dan tokoh Pemuda.

Berdasarkan Kriteria diatas dapat ditentukan sampel sebanyak 8 orang.

Sehingga total keseluruhan yang menjadi sampel pada penelitian ini sebanyak 13 (tiga belas) orang.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (interview)

Metode interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di rekam atau di catat.²²

Adapun bentuk yang digunakan adalah wawancara berstruktur yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan atau sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Metode ini merupakan metode pokok yang dapat membantu penulis untuk mendapatkan data yang akurat tentang bagaimana peran pemerintah terhadap penyelesaian konflik dalam pembangunan pasar di desa karang anyar kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan adalah sebagai berikut :

Metode apa yang digunakan dalam penyelesaian konflik yang ada di masyarakat, Bagaimana proses penyelesaian konflik melalui advokasi dan mediasi yang ada di desa, apakah pemicu terjadinya konflik, apakah kebijakan yang digunakan untuk penyelesaian konflik. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui respon yang diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

²²Soeharto Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), Cet Ke-7, h.140.

b. Observasi

Metode Observasi adalah metode penelitian studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena dan psikis yang serta kompleks dan dalam pola-pola kultural tertentu dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²³ Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan. Peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian kehidupan yang diobservasi dengan tujuan agar peneliti dapat memperoleh keterangan yang objektif.

Metode non partisipan ini dilaksanakan dengan cara peneliti berada dilokasi penelitian, hanya pada saat melaksanakan dengan cara tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu pasar karang anyar tersebut. Dalam hal ini peneliti hanya semata-mata pengamat dan mencatat terhadap semua gejala dan fenomena dan kegiatan yang berkaitan dengan masalah “Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pasar di Desa Karang Anyar Kec Jati Agung Kab Lampung Selatan”

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk

²³Husain Usman dan Purnomo Satedi Akbar, *Metode Penelitian sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.hal 36.

mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁴ Jadi dokumentasi adalah suatu data yang tersedia dan di bukukan penulis menggunakan metode ini dengan mengharapkan menemukan data yang berkaitan dengan judul skripsi, yakni sejarah berdirinya pasar karang anyar dan foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah dan sebagainya.

G. Teknik Analisa Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka proses selanjutnya merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan penelitian yaitu analisis data. Data yang telah didapat kemudian diidentifikasi secara keseluruhan dan kemudian diklarifikasikan jenis masing-masing. Menurut bog dan analisis data adalah proses mencari dan menyusun catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.²⁵

Miles and Hubermen, mengemukakan bahwa Aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :*data reduction, data display, dan data consulusion drawing/verification*.²⁶

Pada pelaksanaan tahapan ini tidak dilakukan secara beruntutan, namun secara luwes dan fleksibel, disebut juga sebagai model interaktif dikarenakan

²⁴Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 143.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 244.

²⁶*Ibid*, h. 246.

proses-proses tersebut saling berhubungan dan bereaksi selama dan sesudah pengumpulan data.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasardan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, member kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan.²⁷

Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan pasar di desa karang anyar kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan ,Kemudian memilah-milahnya kedalam katagori tertentu.

2. Penyajian Data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan kedalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarnya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami.²⁸

Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian ini yaitu peran pemerintah desa dalam pembangunan pasar desa karang anyar.

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973), h. 75.

²⁸*Ibid*, h.75.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan (verifikasi) data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan dengan cara deduktif. ²⁹Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yangtelah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini di maksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

Setelah data diolah dan diklasifikasi, maka tahap berikutnya data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dari rangkaian yang bersifat khusus yang di ambil dari individu kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. ³⁰

H. Penelitian Terdahulu

CARLOS, J ADAM *Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Warga Desa Basaan Kecamatan Ratatotok*. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya pertikaian antar warga desa basaan pertikaian antar warga kerap hanya dijadikan persoalan sepele ketika persoalan tersebut bisa dikatakan belum berdampak besar pada kondisi masyarakat desa. Timbulnya korban dari pertikaian tersebut justru baru akan mengundang tindakan pemerintah kabupaten untuk segera menyelesaikan persoalan. Penelitian ini mengkaji lebih jauh pandangan-pandangan dari informan baik dari pemerintah desa, maupun warga desa yang bertikai. Seperti

²⁹*Ibid*, h. 75.

³⁰*Ibid*, h. 75.

apa yang dipahami dalam kajian teoritis pada bab sebelumnya. Pertikaian yang terjadi dalam masyarakat maupun tindak kekerasan lainnya semuanya tidak pernah berdiri sendiri atau dalam artian terdapat penyebab yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan. Kekerasan kolektif menggores luka besar, hingga akhirnya berbagai data mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok warga tertentu memberi bukti bahwa kekerasan antar kelompok dalam bentuk perkelahian bisa saja dialami dan dilakukan oleh berbagai pihak. Perkelahian antar kelompok tersebut kini di Desa Basaan sudah menyentuh berbagai kalangan seperti yang disebutkan sebelumnya.

STEFFY ADELIA TINDI *Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng,*
Adapun Hasil Penelitian Yang Kedua Ini Adalah, Hambatan dan keterlambatan pembangunan desa pada umumnya disebabkan oleh tidak tersedia sumber daya manusia (SDM) yang potensial, mentalitas aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah desa, kekurangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, desa terpencil dan kekurangan dana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa Pineleng Dua telah berperan utama dalam perencanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dan diproses ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat desa diberikan

kekuasaan oleh Negara melalui UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah untuk memenuhi kepentingan hidup dan kehidupan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat desa sendiri. Oleh sebab itu desa melanjutkan pembangunan dengan membuat konsep pembangunan desa yang dipikir dan rancang sendiri oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga pemerintahan desa melalui musyawarah mufakat dan demokratis. Dalam perencanaan pembangunan di desa Pineleng Dua dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun 2015.

LIONY NIKE OVINDA *Peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana (studi pada desa adijaya)* adapun hasil penelitian yang ketiga ini adalah telah diatur secara eksplisit dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. bahkan untuk lebih menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan, pasal 28 mengancam melalui sanksi, bagi kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Penerapan mediasi oleh kepala desa merupakan upaya dalam menerapkan atau mewujudkan *restorative justice*, hal ini diterapkan oleh kepala desa hanya terhadap perkara tindak pidana ringan saja. Peran kepala desa sangatlah penting, hal ini untuk menjaga ketentraman dan menguatkan persaudaraan pada masyarakat, selain itu

juga untuk meringankan beban masyarakat dalam menumpuh proses beracara formal yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan perselisihan yang berlarut-larut.



BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN KONFLIK

A. Pendekatan Partisipasi

1. Pengertian partisipasi

Menurut Aprillia Theresia partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.¹ Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.²

Britha Mikkelsen, mendefinisikan partisipasi menjadi 6 arti yaitu :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

¹Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 198.

² Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007), h.27.

- d. Partisipasi adalah pemanfaatan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.³

Selanjutnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L., Gillin dan J.P Gillin sepakat bahwa istilah masyarakat adalah adanya saling bergaul dan interaksi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identifikasi bersama.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Peran serta masyarakat antar satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda dengan sesuai kapasitas dan kemampuan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan. Perbedaan wujud partisipasi ini kemudian akan memunculkan beberapa bentuk partisipasi yang berbeda-beda. Ndraha berpendapat bahwa partisipasi bentuknya dapat berupa: kontak sosial dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial, partisipasi dalam memperhatikan dan memberi

³Britha Mikkelesen, *Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h.64.

tanggapan terhadap informasi, baik menerima maupun menolaknya, partisipasi dalam perencanaan dan penetapan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dan partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan program pembangunan.

Menurut Totok Mardikanto mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat;
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.⁴

3. Tingkatan Partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, menurut Wilcox mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu:

- a. Memberikan informasi (information);
- b. Konsultasi (consultation) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut;

⁴Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 84.

- c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang diperlukan guna pengambilan keputusan;
- d. Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan;
- e. Memberikan dukungan (*supporting independet community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.⁵

4. Metode Partisipasi

Metode partisipasi merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpulan data dan responden. Pertanyaan-pertanyaan umumnya tidak dirancang secara baku, melainkan hanya garis-garis besarnya saja. Topik-topik pertanyaan bahkan dapat muncul dan berkembang berdasarkan proses tanya jawab dengan responden. Terdapat banyak teknik pengumpulan data partisipasi. Terdapat 4 (empat) diantaranya:

- a. Penelitian dan Aksi partisipasi (*Participatory Research and Action*). Metode ini biasanya menggunakan teknik-teknik visual (tanaman, biji-bijian, tongkat) sebagai alat petunjuk pendataan sehingga memudahkan masyarakat biasa (bahkan yang buta huruf) berpartisipasi.
- b. Stakeholder Analysis. Analisis terhadap para peserta atau pengurus dan anggota suatu program, proyek pembangunan atau organisasi sosial

⁵*Ibid.*, h. 86.

tertentu mengenai isu-isu yang terjadi dilingkungannya, seperti relasi kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Metode ini digunakan terutama untuk menentukan apa masalah dan kebutuhan suatu organisasi, kelompok, atau masyarakat setempat.

- c. **Beneficiary Assessment.** Pengidentifikasia masalah sosial yang melibatkan konsultasi secara sistematis dengan cpara penerima pelayanan sosial. Tujuan utama pendekatan adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan partisipasi, merancang inisiatif-inisiatif pembangunan, dan menerima masukan-masukan guna memperbaharui sistem dan kualitas pelayanan dan kegiatan pembangunan.
- d. **Monitoring dan Evaluasi Partisiapsi (Participatory monotoring and Evaluation).** Metode ini melibatkan anggota masyarakat dari berbagai tingkatan yang bekerjasama mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta melahirkan rekomendasi-rekomendasi.⁶

5. Pendekatan Partisipatif Dalam Penyelesaian Konflik

Pendekatan partisipatif merupakan salah satu cara merumuskan kebutuhan pembangunan daerah dan desa yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Konsep Pendekatan Partisipasi banyak di pakai ketika

⁶Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Op, Cit.* h. 82-83.

berhubungan dengan pembangunan. Tetapi pada penelitian ini Pendekatan Partisipasi dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik pembangunan. Konsep Pendekatan ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan penyelesaian konflik pembangunan di tingkat lokal.⁷ Pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik pembangunan merupakan suatu paduan atau model penggalan potensi dan gagasan yang menitikberatkan pada partisipasi atau peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses penyelesaian konflik pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah mengakar dan budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya penyelesaian konflik dalam pembangunan.⁸

Menurut Marzuki, ada dua ciri penting dari pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik pembangunan yaitu :

- a. Adanya kemitraan atas dasar kesamaan antara kedua belah pihak yang diwujudkan dalam fase pengambilan keputusan dan implementasi keputusan penyelesaian konflik.
- b. Masyarakat setempat atau kedua belah pihak sendiri yang membuat keputusan mereka dan mengambil tanggung jawab penuh dalam pengembalian keputusan penyelesaian konflik.

⁷ Nurman, M.Si., Ph.D, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015) hal 23.

⁸ Wahyudin K., *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2004). hal 26

Oleh karena itu tujuan yang dapat dicapai dengan menerapkan pendekatan partisipatif dalam semua tahapan/proses penyelesaian konflik pembangunan desa ialah :

- a. Mengikutsertakan semua kelompok kepentingan dalam setiap tahapan proses penyelesaian konflik pembangunan.
- b. Menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap permasalahan yang mereka miliki.
- c. Dihargainya inisiatif masyarakat dalam setiap tahapan proses penyelesaian konflik pembangunan.
- d. Munculnya kemandirian dari masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.⁹

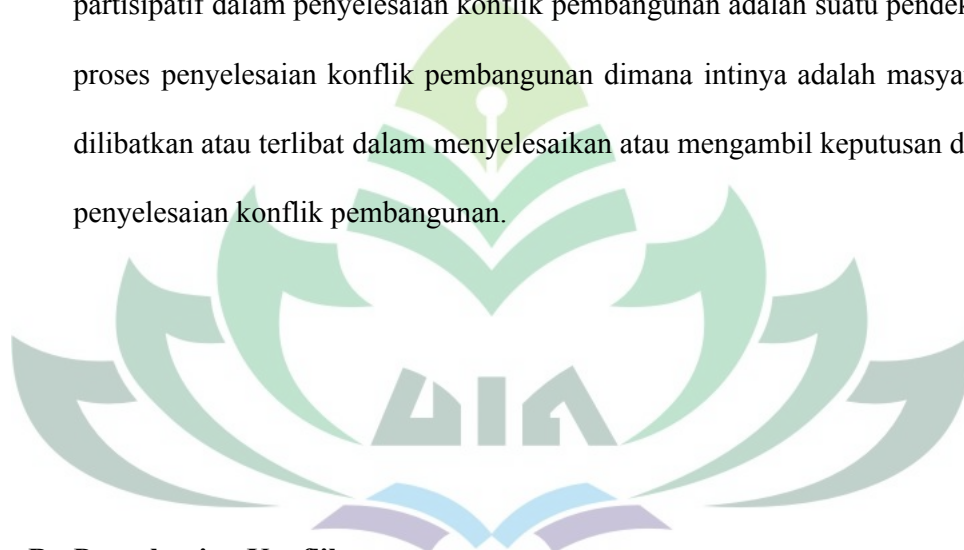
Bryant dan White mengemukakan pendekatan partisipatif (bottom up) dalam penyelesaian konflik pembangunan sangat efektif karena :

- a. Melalui pendekatan partisipatif (bottom up) masyarakat dapat memberi tanggapan, jawaban atau feed-back dalam suatu permasalahan yang mengenai hal-hal menyangkut jawaban, tanggapan, laporan, keluhan, dan lainnya.
- b. Melalui pendekatan partisipatif (bottom up) masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan atau tuntutan kepada kedua belah pihak yang berkonflik.

⁹ Marzuki M., *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif, Modul PKM*, (Jakarta, Departemen Dalam Negeri. 2004) hal 32

- c. Melalui pendekatan partisipatif (bottom up) dapat terjadi tawar menawar, permufakatan atau kerjasama antara masyarakat atau kedua belah pihak yang berkonflik.
- d. Melalui pendekatan partisipatif (bottom up) dapat terjadi proses exchange antara masyarakat atau kedua belah pihak.¹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik pembangunan adalah suatu pendekatan proses penyelesaian konflik pembangunan dimana intinya adalah masyarakat dilibatkan atau terlibat dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam penyelesaian konflik pembangunan.



B. Penyelesaian Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja *Latin configure* yang berarti saling memukul. Konflik dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai percekocan, perselisihan, dan pertentangan.¹¹ Definisi konflik menurut para ahli sangatlah bervariasi karena para ahli melihat konflik dari berbagai sudut

¹⁰ Bryant dan Louise, Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang, terjemahan, (Jakarta, LP3ES. 2005) hal 21

¹¹Hamzah Ahmad, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya; Fajar Mulia, 1996) Hal. 208

pandang atau perspektif yang berbeda-beda.¹² Secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa.

Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial, demikian menurut Koentjaraningrat.¹³ Menurut Nader dan Fod dalam bukunya *Dispute Procces In Fen Societies* ada tiga fase atau tahap dalam proses bersengketa.¹⁴

- a. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.
- b. Konflik adalah keadaan para pihak menyadari atau mengetahui ,tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.
- c. Sengketa adalah keadaan konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau melibatkan pihak ketiga.

Pada fase pertama mempunyai ciri *monodik* yaitu ada satu pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Sedangkan fase kedua memiliki cirri *dialik* artinya kedua pihak merasa sadar telah masuk fase konflik dan terakhir mempunyai cirri *triadic* atau publik, sengketa antara mereka tidak dapat terselesaikan oleh mereka sendiri sehingga telah mengikutsertakan pihak lain

¹²Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1995. Hal. 21

¹³Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, (Jakarta; Gramedia,1982) Hal.103

¹⁴Mulyo Putro, *Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung; Fokusmedia, 2002) Hal. 188

untuk ikut menyelesaikan sengketa mereka. Konflik atau sengketa merupakan suatu peristiwa hukum sehingga sebabnya juga dapat dikenal dengan melihatnya melalui pandangan. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Bentuk konflik berdasarkan sifat pelaku terbagi atas konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak, sedangkan konflik tertutup merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam konflik.

Timbulnya bentuk-bentuk konflik pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:¹⁵

- a. Konflik Kepentingan (*Interest Conflict*), dalam melaksanakan kegiatan setiap pihak memiliki kepentingan, tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama. Timbulnya konflik kepentingan ada beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing
 - 2) Ada kepentingan substansi dari para pihak
 - 3) Ada kepentingan procedural
 - 4) Ada kepentingan psikologi
- b. Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*), konflik hubungan dapat terjadi karena adanya kadar emosi yang kuat (*strong emotion*) adanya

¹⁵Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Umum, 2001) Hal. 21-22

kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*) dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang

- c. Konflik Struktur (*Structural Conflict*), konflik struktur dapat terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau interaksi kontrol yang tidak sama. Kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan geografis, psikologi yang tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama serta waktu yang sedikit.

Ralf Dahrendorf mengatakan dalam hubungan-hubungan kekuasaan beberapa orang memiliki kekuasaan, sedangkan yang lain tidak.¹⁶ Ada dua macam tataran konflik, yang pertama adalah konflik laten, pertentangan untuk memenuhi kebutuhan tidak terwujud dalam konflik terbuka, dan yang kedua adalah konflik manifest, yaitu jika konflik yang pertama tadi mewujudkan kedalam pertikaian terbuka.¹⁷ Dahrendorf juga melihat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan :

- a. Seluruh aktifitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan kelompoknya dan masyarakatnya disebabkan
- b. terjadinya konflik antara kelompok dan kelompok, individu dan individu serta antara emosi dan emosi di dalam diri individu.¹⁸

¹⁶Ralf Dahrendorf, dalam Margaret M. Polma, 2000, *Sosiologi Kontemporer*. Hal 134

¹⁷ Ralf Dahrendorf, dalam bukunya Soeryono Soekanto, 1995, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta) Hal. 111

¹⁸Ibid, Hal. 113

Konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada, namun demikian dalam interaksi antar masyarakat juga terjadi kesepakatan atau kerjasama yang sering disebut dengan konsensus. Dahrendrof juga mengatakan bahwa masyarakat bersisi ganda, yakni memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama sehingga dalam memperebutkan kekuasaan politik, elit dan kelompok elit akan menghadapi dua kondisi, yakni konflik dan konsensus. Di satu sisi, elit politik akan menghadapi perbedaan, persaingan, dan pertentangan dengan elit lainnya, disisi lain juga memungkinkan terjadinya kerjasama atau konsensus di antara elit politik. Terjadi tawar menawar antar elit politik yang saling menguntungkan, sehingga kebutuhan dan kepentingan setiap elit politik terakomodasi.

2. Bentuk Bentuk Konflik

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat. Keempat bentuk itu adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, dan konflik antar-kelas sosial.

- a. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang-perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antar

pribadi dalam menyikapi suatu hal. Misalnya, individu yang terlibat ulang atau masalah pembagian warisan dalam keluarga.

- b. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antar partai politik karena perbedaan ideology, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya, bentrokan antar partai politik pada saat kampanye.
- c. Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya, konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras (rasialisme) di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
- d. Konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya, konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah.

3. Konflik Dalam Pembangunan Pasar

Gencarnya pembangunan di Indonesia seakan-akan tidak terlepas dari konflik, selain konflik sosial- komunal, juga ada konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. Pada konteks ini, pembangunan pasar menjadi sorotan utama permasalahan pada bidang infrastruktur karena pasar merupakan alat yang digunakan pemerintah daerah untuk menumbuhkan

perekonomian, sehingga banyak pihak-pihak yang punya kepentingan. Oleh karenanya, tidak mengherankan ketika masyarakat sipil kerap bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang akhirnya menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat sipil. Perbedaan tersebut terjadi umumnya karena kepentingan yang berbeda.

Bentuk konflik yang terjadi pada pembangunan pasar salah satunya konflik kepentingan yang melibatkan pihak-pihak antara lain pedagang, pengembang, dan pemerintah. Pedagang, pengembang, dan pemerintah masing-masing punya peranan di tatanan pasar, pedagang misalnya, punya kepentingan karena dia adalah pihak yang menjalankan proses “jual-beli”¹⁹ dalam pasar, pengembang juga punya peranan karena merupakan pihak ketiga yang di tunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan pembangunan pasar dan pengelolaan pasar setelah selesai pembangunannya, pemerintah punya peranan sebagai pihak yang ingin memajukan perekonomian sebuah daerah.

Konflik kepentingan dapat dikatakan sebagai suatu oposisi atau petentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi yang disebabkan oleh adanya berbagi macam perkembangan dan perubahan, serta menimbulkan perbedaan pendapat, konflik kepentingan terjadi oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap individu atau kelompok-kelompok yang saling bersinggungan. Semua konflik kepentingan seringkali dipandang sebagai pencapaian tujuan satu pihak dan merupakan kegagalan

¹⁹ Jual-beli yang dimaksud adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.

pencapaian tujuan pihak lain. Hal ini karena seringkali orang memandang tujuannya sendiri secara lebih penting, sehingga meskipun konflik yang ada sebenarnya merupakan konflik yang kecil, seolah-olah tampak sebagai konflik yang besar. Konflik muncul diakibatkan salah satunya perebutan sumber daya. Ini terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya.

Teori konflik kepentingan memiliki tiga asumsi utama yang saling berhubungan :

1. Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya
2. Kekuatan bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata sebagai sumber konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa (*coercive*). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak memperoleh sama sekali
3. Ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.

Berdasarkan tiga asumsi konflik kepentingan tersebut, maka penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut :

1. Perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan

2. Langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas dan posisi
3. Persaingan

Konflik kepentingan akan muncul ketika kebutuhan, nilai, dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul. Konflik kepentingan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.²⁰

4. Cara Penyelesaian Konflik

Ada dua cara penyelesaian konflik yaitu :

a. Persuasif

Menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antara mereka saja maupun menggunakan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau juru damai.

²⁰Lihat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

b. Secara koersif

Yaitu menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

Menurut D. Hendro puspito OC, cara penyelesaian konflik yakni :

- 1) Konsolidasi berasal dari kata Latin conciliatio atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses ini pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dianggapnya baik kepada kedua pihak yang berselisih untuk menghentikan sengketa.
- 2) Mediasi berasal dari kata Latin mediatio, yaitu suatu cara untuk menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang perantara (mediator). Seorang mediator tidak berwenang untuk memberikan keputusan yang mengikat (hanya bersifat konsultatif). Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.
- 3) Arbitrasi berasal dari kata Latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati.

- 4) Paksaan (Coercion). Paksaan ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau psikologis. Pihak yang bisa menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang dan bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh.
- 5) Détente. Detente berasal dari kata Perancis yang berarti mengendorkan, yang berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai guna persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian.²¹

Menurut Soerjono Soekanto cara penyelesaian konflik mempunyai beberapa bentuk, yaitu :

- 1) Coercion, adalah suatu cara penyelesaian konflik yang prosesnya dilaksanakan oleh karena adanya paksaan, di antara salah-satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara fisik (secara langsung), maupun secara psikologis (secara tidak langsung).
- 2) Compromise, adalah suatu cara penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk dapat dilaksanakan compromise adalah bahwa salah

²¹ D. Hendro puspito OC, *Sosiologi sistematis*, (Jakarta: Kanisius 1989) hal. 250-251

satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan begitu pula sebaliknya.

- 3) Arbitration, merupakan suatu cara untuk mencapai compromise apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh suatu badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertentangan.
- 4) Mediation, adalah suatu cara penyelesaian konflik dengan mengundang pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada. Pihak ketiga tersebut tugas utamanya adalah mengusahakan suatu penyelesaian secara damai. Kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat dan tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan-keputusan penyelesaian perselisihan tersebut.
- 5) Conciliation, adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.
- 6) Toleration (tolerant-participation) adalah suatu cara penyelesaian konflik tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Kadang-kadang toleration timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan.
- 7) Stalemate, adalah suatu cara penyelesaian konflik ketika pihak-pihak yang bententangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya. Hal ini disebabkan karena bagi kedua belah pihak



sudah tidak ada kemungkinan lagi baik untuk maju maupun untuk mundur.

- 8) Adjudication, adalah suatu cara penyelesaian konflik atau sengketa di pengadilan.²²

C. Pembangunan Pasar

1. Pengertian Pembangunan Pasar

Pembangunan merupakan kegiatan yang selalu terus menerus untuk dilakukan, tujuan dari pembangunan adalah untuk memberikan perubahan kepada masyarakat, terutama untuk menciptakan kesejahteraan. Menurut S.P. Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa.²³ Menurut Bintoro Tjokroamidjojo pembangunan merupakan suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang di anggap lebih baik (lebih diinginkan)²⁴

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli dan bisnis, Katabisnis berasal dari bahasa Inggris, *business (biznes)*, artinya perusahaan atau usaha, seperti ungkapan "*the grocery business*" artinya perusahaan sayur-

²² Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta.PT Raja Grafindo Persada, 1990) h. 77-78

²³ Siagian, Sondang P (2007) *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta, Gunung Agung. hal.2

²⁴ Bintoro Tjokroadmidjojo, *pengantar administrasipembangunan LP3ES, Cet.Ke-3* (Jakarta:PT Pustaka LP3ES Indonesia ,1995), hal.189

sayuran.²⁵ Secara umum pengertian pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi mereka yang aktual atau potensial, menetapkan harga suatu produk atau sekumpulan produk.²⁶ Dalam pengertian lain pasar merupakan tempat penjual dan pembeli bertemu untuk membeli atau menjual sumberdaya, barang, dan jasa.²⁷

Jadi yang dimaksud dengan pembangunan pasar yaitu suatu kegiatan membangun sarana dan prasarana fisik pasar sebagai tempat aktifitas jual beli secara berkesinambungan, agar terwujudnya perubahan pasar menuju kearah yang lebih baik.

2. Fungsi Pembangunan Pasar

Pembangunan Pasar yang dimaksud di dalam penelitian ini ialah suatu Program Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat yang merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Perdagangan RI yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omzet, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat dan mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global yang kian terbuka lebar. Lokasi pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat diprioritaskan atau diutamakan untuk pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun, pasar yang mengalami

²⁵ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1984), h. 90.

²⁶ ORobert 5.Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, terj. Aldi Jenie, (Jakarta: Prenhallindo, 1999), Jilid 1, h.9

²⁷ Richard A. Bilas, *Microeconomic Theory*, terj. Gunawan Hutaauruk. (Jakarta: Erlangga, 1995), cet. Ke-II, h.5

bencana kebakaran, pasca bencana alam, dan konflik sosial, daerah tertinggal, perbatasan, atau daerah yang minim sarana perdagangannya, serta daerah yang memiliki potensi perdagangan besar.

Tujuan dari revitalisasi pembangunan pasar rakyat adalah guna meningkatkan pendapatan para pedagang juga pelaku-pelaku ekonomi yang ada di masyarakat. Selain itu juga untuk memudahkan akses transaksi jual beli dengan nyaman. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka revitalisasi pembangunan pasar rakyat yang dilakukan oleh Kemendag RI bukan hanya dari sisi perbaikan fisik saja, melainkan juga dari sisi ekonomi, sosial budaya dan manajemen.²⁸

3. Problematika Pembangunan Pasar

Di dalam suatu program pembangunan atau revitalisasi infrastruktur suatu prasarana desa hakikatnya memiliki tujuan yang positif bagi kenyamanan masyarakat setempat dalam menjalani berkehidupan. Tetapi, tidak dapat dipungkiri seiringnya program pembangunan itu di laksanakan terdapat berbagai permasalahan yang di hadapi oleh pemangku kebijakan dalam hal ini, pihak pemerintah. Begitupula dalam hal pembangunan fisik suatu pasar rakyat. Yang memiliki tujuan yang baik yaitu untuk memudahkan akses transaksi jual beli dengan lebih nyaman. Tetapi saat pelaksanaan pembangunan nya terdapat problematika yang datang baik dari pihak pemerintah ataupun dari pihak pedagang (masyarakat) itu sendiri.

²⁸ Website Kementerian Perdagangan RI, *Konsep Revitalisasi atau Pembangunan Pasar Rakyat*, (<https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/KonsepRevitalisasi.aspx>) diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

Problematika-problematika pembanguna pasar yang sering terjadi ialah sebagai berikut;

a. Persoalan lahan/Sengketa Tanah

Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan menurut Rusmadi Murad sengketa hak atas tanah, yaitu: timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.²⁹ Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu :

- 1) Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
- 2) Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
- 3) Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
- 4) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.

²⁹ Rusmadi Murad, *"Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah"* Bandung : Alumni, 1999. Hlm 22-23

b. Anggaran Pembangunan

Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri, memberikan definisi anggaran yang banyak dipakai adalah sebagai berikut: *"Suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggungjawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan "*.³⁰

Dari definisi tersebut dapat diambil intinya yakni :

- 1) Bahwa anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran harus disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis.
- 2) Bahwa anggaran harus bersifat sistematis, artinya bahwa anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika.

Anggaran dalam suatu rencana pembangunan terkadang juga mengalami kendala baik dari pihak internal maupun dari eksternal. Contohnya dari pihak internal dana anggaran yang telah di ajukan sangatlah susah di salurkan oleh pemerintah pusat sehingga dapat mengagu jalannya pelaksanaan pembangunan. Sedangkan contoh hambatan dari pihak eksternal ialah masyarakat yang lahan tanah nya terkena pembangunan mengajukan dana ganti rugi yang sangat besar, sehingga pemerintah harus mengatur anggaran kembali agar dapat sesuai dengan realita pengeluaran nya.

c. Relokasi

³⁰ Gunawan Adisaputro, Marwan Asri, *Anggaran Perusahaan I Edisi Ketiga*.(Yogyakarta: BPFE 1995) h. 68

Relokasi adalah pemindahan lokasi industri dari suatu negara maju ke negara berkembang atau dari negara atau negara lain untuk mendekati bahan baku dan menghasilkan jenis barang yang mampu bersaing di pasar internasional. Menurut kamus besar bahasa indonesia relokasi merupakan pemindahan tempat rencana industri pada suatu daerah segera diwujudkan.³¹

Proses Relokasi pedagang ke tempat sementara atau yang baru terkadang juga menimbulkan suatu permasalahan. Ada beberapa permasalahan yang selalu ada saat pedagang di relokasi antara lain Pedagang merasa tempat relokasi pasar tidak strategis sehingga mematikan pendapatan mereka, atau biaya sewa yang sangat tinggi dan fasilitas yang sangat kurang sehingga pedagang tidak ingin untuk pindah ke lokasi relokasi yang telah di tentukan.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus besar bahasa indonesia 1982 h. 739.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA KARANG ANYAR KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Gambaran Umum Desa Karang Anyar

1. Sejarah Desa

Asal-usul Desa Karang Anyar adalah berasal dari Nama Desa Karang Anyar di Jawa Tengah yang masyarakatnya pindah ke Lampung/Sumatera. Dahulu Desa Karang Anyar adalah hutan belantara, kemudian dibukalah hutan tersebut oleh orang-orang transmigran dari Jawa Tengah yang pindah ke Sumatera.

Nama Karang Anyar diambil dari bahasa jawa. Karang yang artinya Lahan, dan Anyar yang artinya Baru, yang berarti Lahan Baru. Pada saat itu Desa Karang Anyar belum berdiri sebagai Desa, melainkan sebuah kampung. Maka dari itu dahulu Karang Anyar dipimpin oleh seorang Kepala Kampung.

Tabel 1
Daftar Nama Kepala Desa Karang Anyar

No.	Nama Kepala Desa	Tahun pemerintahan
1	Suparmin	1997 - 2013
2	Sumanto	2013 sampai sekarang

Sumber : Data Dokumentasi Desa Karang Anyar tahun 2018 dicatat pada tanggal 05 September 2019

2. Visi dan Misi Desa Karang Anyar

Adapun visi dan misi Desa Karang Anyar sebagai berikut :

a. Visi

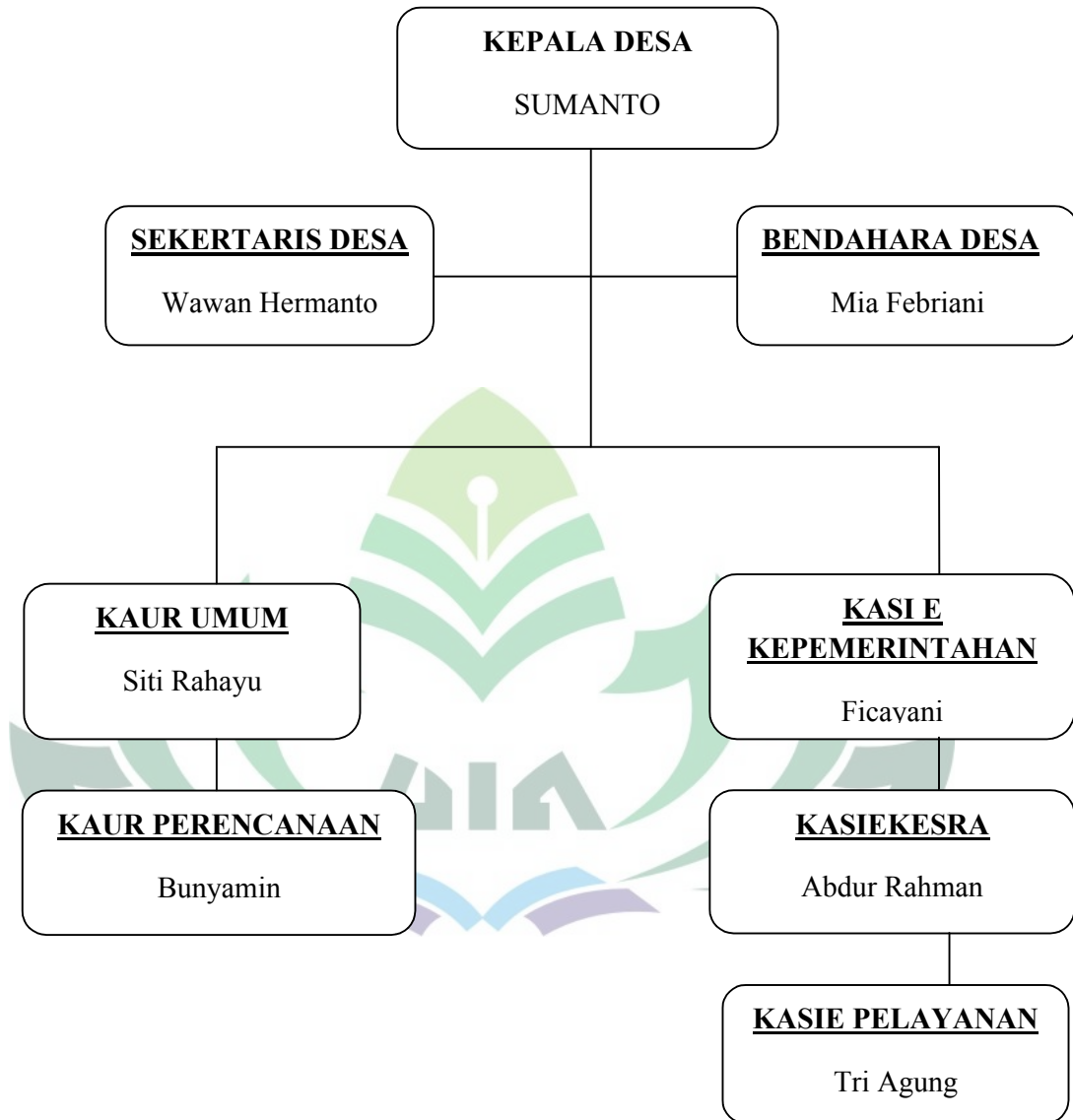
Kebersamaan dalam membangun Desa Karang Anyar yang telah maju.

b. Misi

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa Karang Anyar yang ada.
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa Karang Anyar menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa berupaya mewujudkan Desa Karang Anyar yang aman, tentram dan damai.
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa Karang Anyar memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

¹ *Data Dokumentasi Desa Karang Anyar tahun 2018*, dicatat pada tanggal 05 September 2019

Bagan 1
Struktur Organisasi Desa Karang Anyar



Sumber : Data Dokumentasi Desa Karang Anyar tahun 2018 dicatat pada tanggal 05 September 2019

3. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Krang Anyar

a. Geografis Desa Karang Anyar

Desa Karang Anyar adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan, desa ini berbatas dengan desa Desa Rejomulyo disebelah Utara, disebelah Timur berbatasan dengan Desa Marga Kaya/ Marga Agung, disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Sari dan disebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidorejo/ Desa Natar .

Luas wilayah Desa Karang Anyar adalah 4.810 Ha, jarak dengan Kecamatan Jatimulyo \pm 4 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit, sedangkan jarak desa ke Kabupaten \pm 65 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam.

b. Demografis Desa Karang Anyar

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 17.607 jiwa pada tahun 2018.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Jiwa	Persentase %
1	Laki-laki	8.794	49,94%
2	Perempuan	8.813	50,06%
Jumlah		17.607	100%

Sumber : Data Dokumentasi Desa Karang Anyar tahun 2018 dicatat pada tanggal 05 September 2019

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	jiwa	Persentase %
1	0-5 tahun	5.261	29,88%
2	6-15 tahun	2.051	11,65%
3	16-54 tahun	8.939	50,77%
4	54 – 90 tahun	1.356	7,70%
Jumlah		17.607	100%

Sumber : Data Dokumentasi Desa Karang Anyar tahun 2018 dicatat pada tanggal 05 September 2019

Pada tabel diatas dapat diamati bahwa usia tertinggi terdapat pada usia 16-54 tahun, dimana pada usia tersebut merupakan usia produktif. Sehingga memungkinkan untuk dilakukan pemberdayaan karena terdapat usia produktif yang sangat tinggi.

4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karang Anyar

Penduduk Desa Karang Anyar berjumlah 17.607 jiwa, dari jumlah tersebut sebanyak 10.359 jiwa telah bekerja dan 7.248 jiwa belum bekerja/tidak bekerja. berdasarkan data tersebut jumlah penduduk yang bekerja lebih banyak dibandingkan penduduk yang belum bekerja. adapun jenis mata pencarian penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No.	Mata Pencapaian	Jiwa	Persentase %
1	Petani	4.493	42,63%
2	Buruh tani	1.216	11,53%
3	Peternak	40	0,4%
4	Pedagang	841	8 %
5	Tukang Kayu	15	0,14%
6	Penjahit	27	0,25%
7	PNS	137	1,29%
8	Pensiunan	50	0,47%
9	TNI/POLRI	89	1 %
10	Perangkat Desa	21	0,19%
11	Buruh	2.594	25%
12	Pegawai swasta	489	4,63%
13	supir	347	3,29%
Jumlah		10.359	100%

Sumber : Data Dokumentasi Desa Karang Anyar tahun 2018 dicatat pada tanggal 05 September 2019

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Karang Anyar bermata pencapaian sebagai petani. Karena sebagian besar dari desa ini adalah wilayah persawahan yang sangat luas. Dikampung ini terdapat kelompok masyarakat yang tergabung dalam gabungan kelompok tani. Kelompok masyarakat ini bergerak dalam bidang pertanian yang sangat kuat. Jadi kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa ini cukup baik jika musim panen dan musim penanaman padi tiba seperti sekarang ini.

5. Kondisi Sosial Budaya Desa Karang Anyar

Mayoritas masyarakat Desa Karang Anyar ini bersuku Jawa. Menurut data dan informasi hampir 100% penduduk bersuku jawa. Sifat-Sifat masyarakat pedesaan masih melekat di Desa Karang Anyar ini. Seperti Keringan (kerja bakti), membacakan Al-Berjanji, Riyungan dan lain sebagainya.

Karena penduduk Desa Karang Anyar mayoritas muslim dan bersuku jawa keadaan aktifitas masih sangat erat dengan kebudayaan jawa atau masih dominan terbukti masih banyak, salah satunya sambatan, sambatan yang di maksud bukan sambatan dalam bercocok tanam, sambatan yang masih erat di desa ini dalam bentuk kegiatan pembangunan rumah. Maksudnya, jika ada masyarakat yang ingin membangun rumah biasanya masyarakat sekitar atau tetangga membantu mendirikan rumah itu tanpa adanya imbalan berupa uang atau gaji tetapi masyarakatnya hanya cukup dengan di beri makanan berupa kue, kopi dan makan. Sambatan ini berlaku di semua dusun, walaupun tidak semua dusun bersuku jawa.

Desa Karang Anyar ini masih kuat dalam budaya yasinan setiap malam jum'at nya, semua kalangan di desa ini setiap malam jum'at selalu berkumpul untuk yasinan di Masjid Al-ikhlas untuk mendoakan keluarganya yang sudah mendahului atau meninggal dunia. Dan setiap rumah membawa 5 besek atau bungkusan nasi dan kue untuk di kumpulkan, dan setelah selesai yasinan, besek dan kue yang dikumpulkan tadi di bagikan lagi kepada masyarakat yang datang yasinan tersebut, biasanya dari anak keci, remaja dan orang tua semuanya datang setiap malam jum'at. Tradisi dan Kebiasaan inilah yang

sampai saat ini masih dijalani oleh masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

6. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Karang Anyar

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Agama/Keyakinan	jiwa	Prosentase %
1	Islam	16.985	96,46%
2	Katolik	244	1,38%
3	Protestan	250	1,44%
4	Hindu	70	0,39%
5	Budha	58	0,32%
Jumla		17.607	100%

Sumber : Data Dokumentasi Desa Karang Anyar tahun 2018 dicatat pada tanggal 05 September 2019

Berdasarkan tabel diatas secara obyektif mayoritas penduduk di Desa ini beragama islam. Keadaan sosial keagamaan berjalan sangat baik hal ini dapat terlihat dengan tidak adanya perselisihan antar umat beragama di Desa Karang Anyar ini. Walaupun terdapat warga yang beragamakan non muslim, seperti Kristen, Hindu, Budha, Khatolik namun masyarakat di Desa Karang Anyar dapat berinteraksi dengan baik dan dapat hidup berdampingan dengan rukun dan saling tolong menolong dengan tidak melihat latar belakang keyakinan mereka.

Secara garis besar, kehidupan masyarakat desa Karang Anyar masih dilandasi oleh nilai-nilai religius yang kuat. Hal ini dibuktikan, mayoritas penduduk di Desa ini menganut agama Islam. Kegiatan Majelis Ta'lim dan

pengajian pun selalu diadakan rutin di setiap dusun oleh masyarakat setempat. Seperti pengajian ibi-ibu yang terdiri dari 17 dusun yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali, di dusun 1A pengajian ibu-ibu dilaksanakan pada hari ,1B pada hari jum'at, di dusun 2A pada hari Rabu, dusun 2B hari Sabtu dan dusun 3A hari Minggu. Begitupun dengan kegiatan risma di setiap dusun tetapi dalam kegiatan Risma ini tidak semua Risma masih aktif hanya tiga puluh dusun dari tujuh belas dusun yang aktif, Karna mereka mempunyai kesibukan ada yang masih bekerja dll.

7. Sarana dan Prasarana Desa Karang Anyar

Tabel 6
Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana	Jenis	Jumlah
Sarana Peribadahan	a. Masjid	12 Unit
	b. Musholla	27 Unit
Pemakaman	c. Makam	15 Unit
Sarana Air Bersih dan Bor	a. Sumur Bor	4 Unit
Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa	a. Poskesdes	1 Unit
	b. Puskesmas	1 Unit
	c. Posyandu	11 Kelompok
	d. Dukun Terlatih	13 Orang
	e. Bantuan Posyandu	PMT Balita
	f. Bidan Desa	4 Orang
Sarana Pendidikan	a. SD Negri dan Swasta	6 Unit
	b. Pondok Pesantren	4 Unit
	c. SLTP	1 Unit
	d. PAUD dan TK	14 Unit

Sumber : Data Dokumentasi Desa Karang Anyar tahun 2018 dicatat pada tanggal 05 September 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang paling banyak dimiliki adalah sarana peribadahan yang berjumlah 39 unit. Sarana paling minim yang dimiliki Desa Karang Anyar adalah sarana air bersih (sumur bor) yang hanya berjumlah 4 unit. Sarana air bersih ini minim dimiliki masyarakat karena topografi Desa Karang Anyar termasuk wilayah daratan rendah sert memiliki saluran imigrasi, sehingga sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan dengan masalah air bersih.

B. Pendekatan Partisipasi Dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Pasar Karang Anyar

1. Latar Belakang Terjadinya Konflik di Pasar Karang Anyar

Pasar merupakan tempat terjadinya jual beli dan bisnis, dengan kata lain perputaran ekonomi dalam skala kecil terjadi dipasar, oleh sebab itu pemerintah Desa Karang Anyar berusaha untuk membangun perekonomian desa dengan cara membangun pasar. Pembangunan pasar membutuhkan dana yang cukup besar sehingga pemerintah Desa Karang Anyar mengajukan bantuan ke Kementerian Perdagangan Pusat agar pasar Desa Karang Anyar dapat direnovasi, namun pengajuan tersebut tidak disetujui oleh Kementerian Perdagangan Pusat dikarenakan kepemilikan lahan atas nama perorangan.

Setelah itu Pemerintah Desa berupaya mencari masyarakat yang ingin menghibahkan tanahnya untuk pembangunan pasar yang baru. Pada tahun

2014 Pemerintah Desa mencoba mendatangi tokoh masyarakat yaitu bapak haji Triyono dan meminta untuk menghibahkan sebagian tanah lapangan untuk dipergunakan sebagai pasar rakyat atau pasar desa. Atas permintaan Pemerintah Desa pak haji Triyono memberikan tanah seluas 2000 meter untuk pembangunan pasar. Tanah yang dihibahkan oleh pak haji Triyono lalu dibuatkan sertifikat tanah hibah oleh pemerintah desa. Hal inilah yang memicu terjadinya konflik, Pemerintah Desa dianggap mengabaikan keluhan ataupun ketidaksetujuan masyarakat terkait pembangunan pasar yang baru. Adapun keluhan masyarakat sebagai berikut:

- a. Tidak menggunakan lapangan bola sebagai relokasi pasar.
- b. Tidak menjadikan pasar sebagai sarana politik dan kepentingan golongan tertentu.

2. Peran Dan Upaya Tokoh-tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik

a. Menggagas Kesepakatan Pertama

Pada tahun 2014 Desa Karang Anyar mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah berupa dana Desa. Adanya dana desa ini membuat pemerintah desa ingin secepatnya menjalankan program desa yaitu pembangunan pasar yang baru atau relokasi pasar desa, sehingga pemerintah desa segera membagi lapangan bola menjadi 2 (dua) bagian.

Pembagian lapangan tersebut memicu kemarahan masyarakat, pemerintah dianggap mengabaikan keluhan masyarakat sehingga tetap

melanjutkan pembangunan pasar yang baru. Masyarakat yang merasa diabaikan oleh pemerintah desa melakukan ujuk rasa atau demo didepan Balai Desa Karang Anyar, masyarakat meminta agar pemerintah desa tidak membagi 2 (dua) lapangan bola dan tidak melanjutkan relokasi pasar.

akibat dari tekanan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat untuk bermusyawarah agar masyarakat mengetahui tujuan dari relokasi pasar tersebut, sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 Pemerintah desa mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Karang Anyar antara lain Kepala Desa, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda, dan Karang Taruna Desa Karang Anyar, musyawarah tersebut dilaksanakan di Balai Desa Karang Anyar, Kec.Jati Agung Kab. Lampung Selatan, dengan agenda Pembahasan penggeseran lapangan yang menghadap utara selatan di putar menjadi menghadap ke timur barat.² Adapun pembahasan Rapat Musyawarah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Pasar
- 2) Penggeseran Lapangan Sepak Bola

Suasana saat musyawarah sangatlah tegang, sebagian masyarakat masih bersikukuh mempertahankan tanah lapangan agar tidak dijadikan pasar baru, dan sebagiannya lagi menerima relokasi pasar untuk kepentingan bersama, adapun hasil dari musyawarah ini berupa :

²Bapak Wawan Hermanto (Sekretaris Desa) Wawancara pada tanggal 10 September 2019 di Kantor Balai Desa Karang Anyar

- 1) Pembangunan pasar Desa Karang Anyar sebaiknya ditempatkan ditempat yang strategis dan jauh dari jalan raya agar tidak mengganggu kenyamanna berlalu lintas dan tidak menimbulkan kemacetan.
- 2) Dipasang instalasi dilapangan, karena lapangan setiap tahun selalu digunakan sebagai tempat sholat idul fitri, upacara kemerdekaan dan kegiatan desa lainnya.
- 3) Lapangan Desa Karang Anyar agar dapat dibangun lebih baik lagi, agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan Desa Karang Anyar bisa lebih maju.
- 4) Jika memungkinkan kegiatan jual beli dipasar dilakukan setiap hari, agar mendapat pemasukan yang lebih meningkat mengingat warga Desa Karang Anyar mayoritas petani dan pedagang.³

Menurut Bapak Sumanto selaku Kepala Desa Karang Anyar pada dasar seluruh Masyarakat Desa Karang Anyar itu setuju, hanya beberapa oknum masyarakat yang tidak setuju, sehingga terjadinya pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pemerintah desa dituduh mencoba menghilangkan sejarah lapangan tersebut.⁴

b. Menggagas Kesepakatan Kedua

³Dokumentasi Hasil Rapat Musyawarah Desa pada tanggal 26 januari 2014

⁴Bapak Sumanto (Kepala Desa) Wawancara pada tanggal 10 September 2019 di Kantor Balai Desa Karang Anyar

Awal juni tahun 2015 mulailah dibangunnya pasar baru dilapangan Desa Karang Anyar awalnya berjalan dengan baik-baik saja sebelum terjadinya unjuk rasa pada tanggal 03 Juli 2015 sehingga terhenti sejenak proses pembangunan tersebut.⁵

Sekitar 120 warga Desa Karang Anyar beramai-ramai mendatangi Kantor Balai Desa untuk berunjuk rasa atas ketidak setujuan diadakan pembangunan pasar dilapangan yang dianggap merupakan tanah milik nenek moyang mereka, warga tersebut beranggapan bahwa kepala desa telah mengambil hak milik warga Desa Karang Anyar atas tanah lapangan tersebut untuk kepentingan diri sendiri.⁶

Menurut Bapak Silo berkembangnya konflik tersebut di karenakan adanya unsur politik di pembangunan pasar tersebut. Karena pada saat itu desa Karang Anyar akan menghadapi pergantian kepala desa baru. Masyarakat yang berkonflik memandang bahwa pembangunan pasar tersebut dikarenakan untuk meningkatkan popularitas kepala desa untuk maju lagi di pemilihan kepala desa. Sedangkan pemerintah desa memandang bahwa ke 120 warga Desa Karang Anyar tesebut ingin menjatuhkan integritas pemerintahan desa pada saat terjadinya konflik pada tahun 2014.⁷

Hari minggu tanggal 19 Juli tahun 2015 tepat setengah bulan dari tragedi demo, masyarakat setempat pun datang kembali ke kantor balai desa untuk mengaspirasikan kekecewaannya dan ketidak setujuannya atas tetap

⁵Ibu Luki (Pedagang Padar Karang Anyar) Wawancara pada tanggal 10 September 2019 di Pesar Karang Anyar

⁶Ibu Ice (Masyarakat yang Kontra terhadap pembangunan Pasar) Wawancara pada tanggal 10 September 2019 di Pesar Karang Anyar

⁷Bapak Silo (Warga Desa Karang Anyar) Wawancara pada tanggal 10 September 2019

dibangunnya pasar baru tersebut. Masyarakat ingin diadakannya musyawarah desa kembali dengan melibatkan masyarakat yang berkontra atau masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pembangunan pasar tersebut. Dikarenakan musyawarah pertama pada tanggal 26 Januari 2014 mereka tidak dilibatkan.⁸

Kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober tahun 2015, Pemerintah Desa dan Masyarakat yang kontra terhadap pembangunan pasar tersebut mengadakan kembali musyawarah desa yang bertempat di Balai Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Yang dihadiri oleh perwakilan Kecamatan Jati Agung, Forkopimcam Jati Agung, Kepala Desa, Aparatur Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Warga Desa Karang Anyar serta perwakilan Disperindag Kabupaten Lampung Selatan, Dinas PU dan Kontraktor Pembangunan Pasar.⁹

Dalam musyawarah desa tersebut yang menjadi penengah yaitu Dinas Perindustrian dan Dagang Kabupaten Lampung Selatan. Di dalam musyawarah tersebut dari setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahannya, baik itu dari pihak masyarakat yang tidak setuju maupun dari pihak Pemerintah Desa.

Dari Pihak Masyarakat yang tidak setuju menyampaikan pendapatnya di dalam forum tersebut perihal kejelasan pembangunan pasar di lapangan, yang menurut masyarakat, lapangan tersebut dianggap merupakan tanah milik

⁸Ibu Hj. Samini (Masyarakat yang Kontra terhadap pembangunan Pasar) Wawancara pada tanggal 10 September 2019 di Pesar Karang Anyar

⁹Bapak Sumanto (Kepala Desa) Wawancara pada tanggal 10 September 2019 di Kantor Balai Desa Karang Anyar

nenek moyang mereka, warga tersebut beranggapan bahwa kepala desa telah mengambil hak milik warga desa karang anyar atas tanah lapangan tersebut untuk kepentingan diri sendiri.¹⁰

Sedangkan pihak pemerintah mengklarifikasi bahwa tanah lapangan tersebut sebagian milik bapak haji Triyono, sebagian tanah tersebut yang telah di hibahkan oleh bapak haji Triyono kepada pemerintah Desa Karang Anyar untuk pembangunan Pasar. Pemerintah Desa Karang Anyarpun memberikan janji untuk menggeser lapangan tersebut ke tempat yang baru.¹¹

Dalam musyawarah pada tanggal 08 Oktober 2015 dalam memberikan pandangan penyelesaian konflik tidak hanya berasal dari kedua belah pihak. Dari tokoh-tokoh yang diundang dalam musyawarah tersebut juga memberikan pandangan dalam penyelesaian konflik ini dengan mereka menyuarakan pendapat bisa dikatakan mereka telah berupaya ikut dalam penyelesaian konflik tersebut.

Di dalam forum tersebut Ustad Bario memberikan pendapat, bahwa di dalam menyelesaikan suatu perkara kedua belah pihak harus meredakan keegoisan individu. Kedua belah pihak harus mendengarkan dari setiap pihak agar menemukan solusi terbaik dan tidak merugikan orang lain. Karena hakikatnya allah mencintai kedamaian. Maka sudah benar forum musyawarah

¹⁰Ibu Hj Ning (Masyarakat yang Kontra terhadap pembangunan Pasar) Wawancara pada tanggal 10 September 2019 di Pesar Karang Anyar

¹¹Bapak Wawan Hermanto (Sekretaris Desa) Wawancara pada tanggal 10 September 2019 di Kantor Balai Desa Karang Anyar

ini diadakan dengan tujuan menemukan solusi yang baik dan diterima oleh semua pihak baik pemerintah desa maupun masyarakat.¹²

Sedangkan perwakilan dari tokoh pemuda yaitu Karang Taruna Desa Karang Anyar yang diwakilkan oleh saudara Ahmad Tri menyuarakan pandangannya, pada awalnya para pemuda di Karang Anyar kami tidak setuju pembangunan pasar di bangun dilapangan, karena kami merasa hak kami dalam bermain sepak bola dirampas oleh kebijakan pemerintah, tetapi setelah mendengar klarifikasi dari pemerintah pada forum ini kami dapat menerimanya dikarenakan lapangan masih tetap ada hanya saja digeserkan dari utara selatan ke timur barat. Harapan kami, permasalahan konflik ini dapat menemukan titik terang penyelesaian agar desa Karang Anyar dapat kondusif seperti semula.¹³

Setelah dilaksanakannya Musyawarah Desa tersebut, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Menyetujui dan menyepakati pembangunan desa karang anyar yang dibangun diatas lapangan.
- 2) Menyetujui dan menyepakati tentang penggeseran lokasi lapangan ketempat yang baru.
- 3) Kepala dusun bertanggung jawab penuh atas persetujuan pembangunan pasar dan penggeseran lapangan kepada masyarakat diwilayah dusun masing-masing.

¹² Ustad Bario (Tokoh Agama Desa Karang Anyar) Wawancara Pada Tanggal 20 November 2019

¹³ Ahmad Tri (Tokoh Pemuda Desa Karang Anyar) Wawancara Pada Tanggal 20 November 2019

- 4) Apabila selama pelaksanaan pembangunan pasar dan penggeseran lapangan ada sekelompok atau oknum warga desa karang anyar berupaya menghambat dan mengganggu pelaksanaan pembangunan tersebut, maka akan dianggap sebagai provokator dan akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan proses hukum yang berlaku.¹⁴

c. Dinamika Pasca Konflik

Pada Desember tahun 2015 pembangunan pasar telah selesai namun sebagian warga tidak mau menempati pasar baru dan tetap menggunakan pasar yang lama untuk berjualan dengan alasan-alasan tertentu. Menurut ibu Mimin selaku pedagang di Pasar Karang Anyar alasan warga tidak mau pindah seperti bangunannya yang kecil, ruang masuk kendaraan pedangan sempit dan harga yang cukup mahal untuk penyewaan tempat dan lain sebagainya. Sebagian lagi pedagang yang netral mengikuti aturan Pemerintah Desa, mereka pindah ke pasar yang baru dibangun di lapangan tersebut.¹⁵

Pada tanggal 02 April 2017 Pemerintah Desa menunggu diresmikan pasar baru namun karena Pemerintah Pusat berhalangan maka batal, setelah seminggu tepat pada tanggal 10 April 2017 diharapkan oleh kepala desa atas peresmian pasar baru, namun tetap saja batal, karena belum ada persetujuan dari Pemerintah Pusat. Sampai pada tanggal 17 April 2017 kepala desa

¹⁴Dokumentasi Hasil Rapat Musyawarah Desa pada tanggal 08 Oktober 2015

¹⁵Ibu Mimin (Pedagang Padar Karang Anyar) Wawancara pada tanggal 10 September 2019 di Pesar Karang Anyar

menunggu peresmian namun tetap saja Pemerintah Pusat belum memberikan surat izin atas peresmian pasar baru tersebut.¹⁶

Seiring berjalannya waktu suasana konflik di pasar tersebut mulai mereda, dengan adanya kesepakatan musyawarah kedua poin ke 4 (empat) apabila ada masyarakat atau oknum yang mencoba mengganggu pembangunan pasar baru maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib sebagai provokator dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat yang kontra akan pembangunan pasar tidak berani mengemukakan pendapatnya, sehingga bagi masyarakat atau pedagang yang tidak setuju dipindahkan ke pasar baru tetap di pasar lama, sedangkan pedagang yang setuju akan adanya relokasi mereka dipindahkan ke pasar yang baru dibangun. Sehingga ke dua tempat pasar tersebut hingga sekarang masih beroperasi dengan sendiri-sendiri.¹⁷

Penyelesaian konflik terkait relokasi pasar sampai saat ini pun masih belum menemukan titik terang, permasalahan ini dianggap selesai begitu saja walaupun masih ada masyarakat yang kontra akan relokasi tersebut. Namun pemerintah desa menganggap hal ini selesai dengan indikator banyaknya masyarakat yang mendukung program Pemerintah Desa.

¹⁶Ibu Maryati(Masyarakat yang Kontra terhadap pembangunan Pasar) Wawancara pada tanggal 10 September 2019 di Pesar Karang Anyar

¹⁷Bapak Wawan Hermanto (Sekretaris Desa) Wawancara pada tanggal 10 September 2019 di Kantor Balai Desa Karang Anyar

BAB IV

ANALISIS PENDEKATAN PARTISIPASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMBANGUNAN PASAR DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Latar Belakang Terjadinya Konflik di Pasar Karang Anyar

Secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Dimana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa sebagaimana telah di jelaskan di BAB II, di dalam suatu program pembangunan atau revitalisasi infrastruktur suatu prasarana desa salah satunya pembangunan pasar akan menghadapi berbagai problematika yang akan terjadi, yang akan menimbulkan pertikaian atau konflik, permasalahan itu bermacam-macam bisa tentang perihal persoalan tanah/lokasi, anggaran pembangunan, dan lain-lain. Konflik yang terjadi di pasar Karang Anyar juga merupakan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu Pemerintah Desa Karang Anyar sebagai pemangku kebijakan dengan masyarakat setempat, permasalahan berawal dari pemerintah desa Karang Anyar tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah pembangunan pasar yang membahas pemilihan lokasi pasar yang baru yaitu lapangan sepak bola.

Masyarakat yang mendengar itu merasa tidak setuju dengan keputusan itu karena masyarakat merasa bahwa lapangan tersebut merupakan milik masyarakat dikarenakan sejarah adanya lapangan tersebut karena perjuangan orang – orang dahulu yang bergotong royong untuk bersama-sama iuran untuk membeli tanah kosong di dekat pasar agar desa Karang Anyar memiliki Lapangan sendiri yang mana untuk digunakan berbagai kegiatan desa. Sehingga masyarakat desa Karang

Anyar beranggapan bahwa pemerintah desa telah mengambil hak milik warga desa karang anyar atas tanah lapangan tersebut untuk kepentingan diri sendiri.

Sedangkan pihak pemerintah mengklarifikasi bahwa tanah lapangan tersebut sebagaiannya itu milik bapak haji Triyono, sebagian tanah tersebut yang telah di hibahkan oleh bapak haji Triyono kepada pemerintah Desa Karang Anyar untuk pembangunan Pasar.

Melihat dari permasalahan di atas konflik terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah tentang gambaran lingkungan. Perbedaan persepsi tersebut disebabkan oleh adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan, serta menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga terjadinya konflik kepentingan. konflik kepentingan terjadi oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap individu atau kelompok-kelompok yang saling bersinggungan yang telah di jelaskan di BAB II

Kepentingan-kepentingan di setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari pemerintah desa yaitu ingin segera memiliki pasar rakyat sendiri yang dapat dikelola langsung dibawah naungan pemerintahan desa. Dari pihak masyarakat yaitu ingin mempertahankan sebagian lahan lapangan yang di pakai untuk pembangunan pasar tersebut.

Menurut Pengamatan Peneliti, Faktor lain berkembangnya konflik tersebut dikarenakan adanya unsur politik di pembangunan pasar tersebut. Karena pada saat itu desa Karang Anyar akan menghadapi pergantian kepala desa baru. Masyarakat yang berkonflik memandang bahwa pembangunan pasar tersebut dikarena untuk meningkatkan popularitas kepala desa untuk maju lagi di

pemilahan kepala desa. Sedangkan pemerintah desa memandang bahwa ke 60 KK warga desa karang anyar tesebut ingin menjatuhkan integritas pemerintahan desa pada saat itu

Selaras dengan teori Timbulnya bentuk-bentuk konflik oleh Joni Enirzon, yang menjelaskan Konflik Kepentingan (*Interest Conflict*), dalam melaksanakan kegiatan setiap pihak memiliki kepentingan, tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama. Timbulnya konflik kepentingan ada beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing
2. Ada kepentingan substansi dari para pihak
3. Ada kepentingan procedural
4. Ada kepentingan psikologi

B. Penyelesaian Konflik Melalui Pendekatan Partisipasi

Pendekatan partisipatif merupakan salah satu cara merumuskan kebutuhan pembangunan daerah dan desa yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Telah dijelaskan di BAB II Konsep Pendekatan Partisipasi banyak di pakai ketika berhubungan dengan pembangunan. Tetapi pada penelitian ini Pendekatan Partisipasi dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik pembangunan. Konsep Pendekatan ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan penyelesaian konflik pembangunan di tingkat local

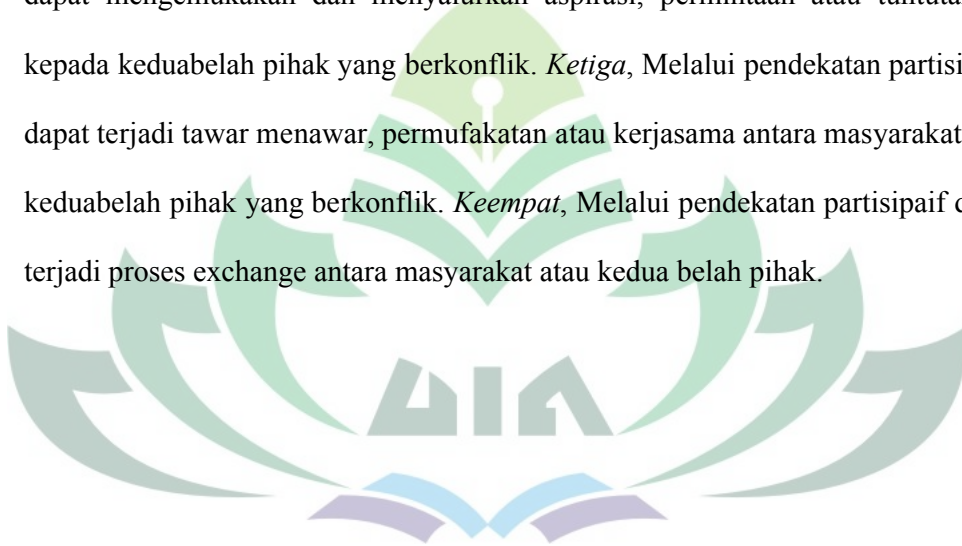
Dalam penyelesaian konflik Pembangunan Pasar di Karang Anyar antara Masyarakat dan pemerintah yaitu dengan cara penyelesaian perusasisf.

Sebagaimana yang telah di jelaskan di BAB II yaitu Menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antara mereka saja maupun menggunakan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau juru damai.

Dalam musyawarah desa tersebut yang menjadi penengah yaitu Dinas Perindutrian dan Dagang Kab. Lampung Selatan. Di dalam musyawarah tersebut dari setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahannya, baik itu dari pihak masyarakat yang tidak setuju maupun dari pihak pemerintah desa. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menyepakati pembangunan desa karang anyar yang dibangun diatas lapangan.
2. Menyetujui dan menyepakati tentang penggeseran lokasi lapangan ketempat yang baru.
3. Kepala dusun bertanggung jawab penuh atas persetujuan pembangunan pasar dan penggeseran lapangan kepada masyarakat diwilayah dusun masing-masing.
4. Apabila selama pelaksanaan pembangunan pasar dan penggeseran lapangana dase kelompok atau oknum warga desa karang anyar berupaya menghambat dan mengganggu pelaksanaan pembangunan tersebut, maka akan dianggap sebagai provokator dan akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Dari pengamatan peneliti dengan melalui pendekatan partisipatif dalam menyelesaikan konflik pembangunan pasar di desa Karang Anyar merupakan cara yang efektif dan masyarakat dapat mengalami proses penambahan ilmu dalam menyelesaikan konflik, manfaat tersebut ialah *Pertama*, Melalui pendekatan partisipatif masyarakat dapat memberi tanggapan, jawaban atau feed-back dalam suatu permasalahan yang mengenai hal-hal menyangkut jawaban, tanggapan, laporan, keluhan, dan lainnya. *Kedua*, Melalui pendekatan partisipatif masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan atau tuntutan kepada kedua belah pihak yang berkonflik. *Ketiga*, Melalui pendekatan partisipatif dapat terjadi tawar menawar, permufakatan atau kerjasama antara masyarakat atau kedua belah pihak yang berkonflik. *Keempat*, Melalui pendekatan partisipatif dapat terjadi proses exchange antara masyarakat atau kedua belah pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan peneleitian lapangan dan telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah di ambil inti pembahasan atau kesimpulan dari Skripsi yang peneliti tulis yaitu sebagai berikut :

Implementasi pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik pembangunan pasar di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung selatan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik pembangunan pasar di Desa Karang Anyar Lampung Selatan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah desa. Dengan tujuan masyarakat dan pemerintah desa dapat duduk bersama mengetahui permasalahan awal yang terjadi. Masyarakat desa juga dapat menyampaikan tuntutan nya atau rasa kekecewaan nya kepada pemerintah desa dan mendengar langsung jawaban dari pemerintah desa perihal pembangunan pasar di Karang Anyar.

Terlaksananya musyawarah tersebut dengan tujuan akhir yaitu keduabelah pihak mencapai kesepakatan dengan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang di setuju oleh kedua belah pihak baik masyarakat maupun pemerintah desa Karang Anyar, agar pembangunan pasar berjalan dengan baik dan masyarakat dengan nyaman menggunakan pasar rakyat tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka peneliti menganggap perlu adanya untuk memberikan saran-saran yang mungkin memberikan manfaat bagi yang membaca, saran-saran itu adalah:

1. Masyarakat memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk menjalankan program pembangunan pasar baru demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa berhak melakukan perannya tanpa ada persetujuan dari masyarakat karena sebenarnya pemerintah desa lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya.
2. Masyarakat desa karang anyar diharapkan ikut serta dan berperan langsung ke lapangan untuk membantu jalannya pembangunan demi kelancaran program yang telah dibuat oleh pemerintah desa dan kepada pemerintah desa agar menyadari pentingnya melakukan sosialisasi tentang program-program yang dibuat oleh pemerintah desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Bintoro Tjokroadmidjojo, *pengantar administrasipembangunan LP3ES, Cet. Ke-3* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995)
- Britha Mikkelesen, *Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)
- Bintoro Tjokroadmidjojo, *pengantar administrasipembangunan LP3ES, Cet. Ke-3* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995)
- Bryant dan Louise, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang*, terjemahan, (Jakarta, LP3ES, 2005)
- D. Hendro puspito OC, *Sosiologi sistematik*, (Jakarta: Kanisius 1989)
- Dalam Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor.1 Tahun 2008 disebutkan *bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian*
- Gunawan Adisaputro, Marwan Asri, *Anggaran Perusahaan I Edisi Ketiga*. (Yogyakarta: BPFE 1995)
- Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gama Press, 1987)
- Husain Usman dan Purnomo Satedi Akbar, *Metode Penelitian sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- Hamzah Ahmad, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Fajar Mulia, 1996)
- Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007)
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)

- John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1984)
- Josef Riwu Kaho, *Analisis Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998)
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001)
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1982)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), Cet. Ke VII
- Lihat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
- Marzuki M., *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif, Modul PKM*, (Jakarta, Departemen Dalam Negeri. 2004)
- Maswadi Rauf (2001) *Konsensus dan konflik politik*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Mulyo Putro, *Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Fokusmedia, 2002)
- Nurman, M.Si., Ph.D, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015)
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, terj. Aldi Jenie, (Jakarta: Prenhallindo, 1999)
- Rusmadi Murad, *“Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah”* Bandung : Alumni, 1999.
- Richard A. Bilas, *Microeconomic Theory*, terj. Gunawan Hutaaruk. (Jakarta Erlangga, 1995), eet. Ke-II
- Ralf Dahrendrof, dalam bukunya Soeryono Soekanto, 1995, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta)
- Richard A. Bilas, *Microeconomic Theory*, terj. Gunawan Hutaaruk. (Jakarta Erlangga, 1995) .

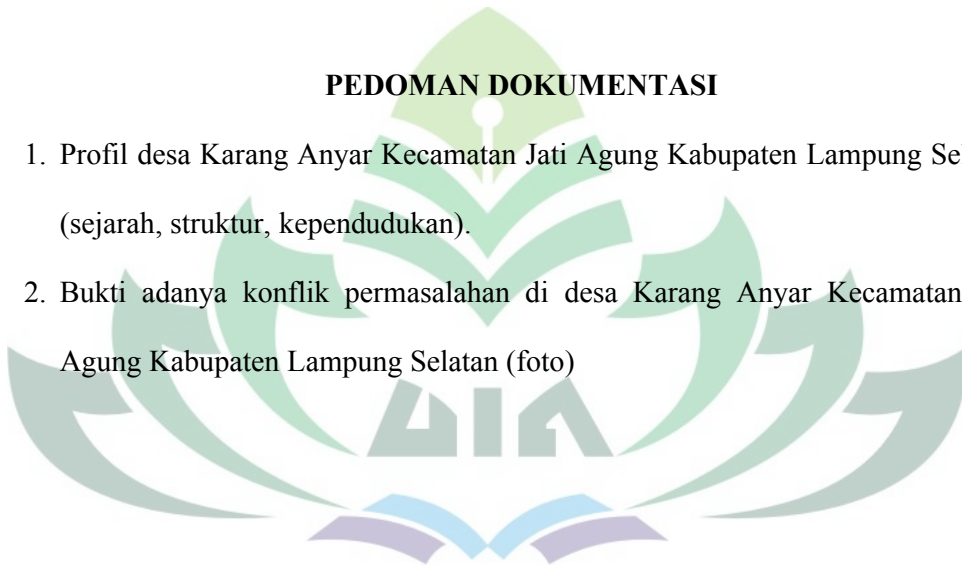
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta.PT Raja Grafindo Persada, 1990)
- Siagian, Sondang P (2007) *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya*.Jakarta, Gunung Agung.
- Sugiono, Metode Penelitian Adminitrasi, (Bandung:Alfabeta, 2001)
- Soeharto Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Rosdakarya,2008),Cet Ke-7,
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973)
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1985) *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta, Haji Masagung.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015),
- Wahyudin K.,*Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2004)
- Website Kementerian Perdagangan RI, *Konsep Revitalisasi atau Pebangunan Pasar Rakyat*,
(<https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/KonsepRevitalisasi.aspx>) diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati keadaan pasar di desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
2. Mengamati dan mencatat terhadap semua gejala dan fenomena dan kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang ada di desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Profil desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (sejarah, struktur, kependudukan).
2. Bukti adanya konflik permasalahan di desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (foto)



DAFTAR NAMA SEMPEL

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Sumanto	Kepala Desa Karang Anyar
2	Wawan Hermanto	Sekretaris Desa Karang Anyar
3	Ibu Luki	Pedagang Pasar Karang Anyar
4	Ibu Ice	Masyarakat Yang Kontra Terhadap Pembangunan pasar
5	Silo	Warga Desa Karang Anyar
6	Hj. Samini	Masyarakat Yang Kontra Terhadap Pembangunan pasar
7	Hj. Ning	Masyarakat Yang Kontra Terhadap Pembangunan pasar
8	Ustd Bario	Tokoh Agama Desa Karang Anyar
9	Ahmad Tri	Tokoh Pemuda Desa Karang Anyar
10	Ibu Mimin	Pedagang Pasar Karang Anyar
11	Ibu Maryati	Masyarakat Yang Kontra Terhadap Pembangunan pasar
12	Ficayani	Kase Pemerintahan
13	Mia Febriani	Bendahara Desa





Gambar 1.
Penulis wawancara dengan kepala desa Karang Anyar



Gambar 2.
Penulis wawancara dengan kepala desa Karang Anyar



Gambar 3.
Penulis wawancara dengan sekretaris kepala desa Karang Anyar



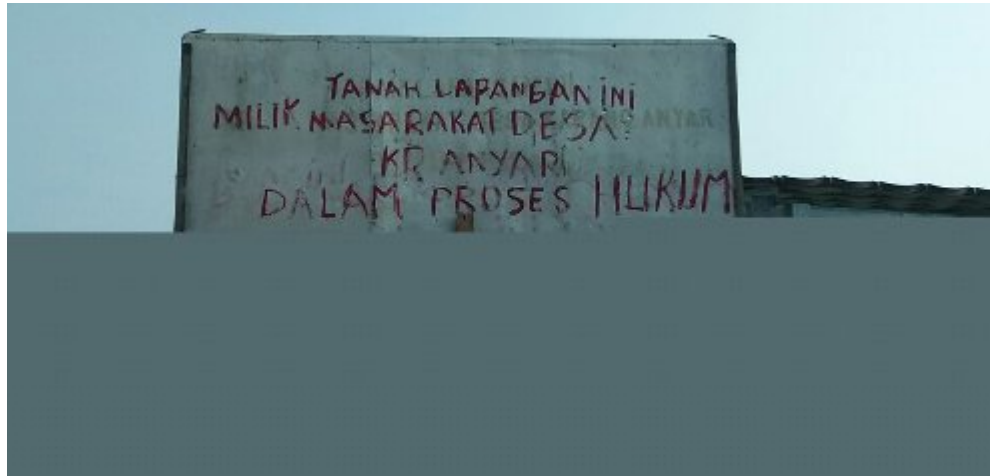
Gambar 4.
Kepala desa dan sekretaris desa memberikan informasi tentang persoalan konflik tanah pasar Karang Anyar



Gambar 5.
Dokumentasi lapangan bola setelah konflik selesai



Gambar 6.
Dokumentasi lapangan dan belakang pasar



Gambar 7.
Dokumentasi setelah terjadinya konflik



Gambar 8.
Dokumentasi pasar baru Karang Anyar



Gambar 9.
Dokumentasi saat terjadinya demonstrasi



Gambar 10.
Dokumentasi saat kepala desa melihat pasar Karang Anyar



Gambar 11.
Dokumentasi kondisi tanah milik perorangan dan pasar lama



Gambar 12.
Dokumentasi kondisi tanah milik perorangan dan pasar lama



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : JL. Letkol. H. Endro Suratmin Kampus Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721)704030/Fax. 7804221, Kode Pos. 35131

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sarah Halimah
NPM : 1441020185
Pembimbing I : Dr.Jasmadi, M.Ag
Pembimbing II : Drs.Mansur Hidayat,M.Sos.I
Judul Skripsi : “Pendekatan Partisipatif dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Pasar di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”

No.	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	28-08-2018	Pengajuan Proposal		
2.	24-09-2018	Perbaikan Proposal		
3.	26-07-2019	ACC Proposal		
4.	20-10-2019	Pengajuan BAB I dan BAB II		
5.	25-10-2019	Perbaikan BAB I dan BAB II		
6.	04-11-2019	ACC BAB I dan BAB II		
7.	19-11-2019	Pengajuan BAB I – BAB III		
8.	27-12-2019	Perbaikan BAB III – BAB V		
9.	31-12-2019	ACC Bab I - Bab V		

Bandar Lampung,
Ketua Jurusan

Dr. H. M. Mawardi J, M.Si
NIP. 196612221995031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, Telp(0721)703260

KARTU DAFTAR HADIR SIDANG MUNAQOSAH

Nama : Sarah Halimah
Npm : 1441020185
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : **Pendekatan Partisipatif dalam Penyelesaian Konflik
Pembangunan Pasar di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati
Agung Kabupaten Lampung Selatan**

No	Hari / Tanggal	Nama	Jurusan	Sekretaris	Paraf
1	Kamis 10 September 2015	Novriyansyah Eka Putra	PMI	Mardiyah. Spd. M. Pd	
2	Rabu 23 Maret 2016	M. Imam Mahfud	PMI	Taufik M.C.i	
3	Jumat 11 September 2015	Munawir Sadzali	PMI	Mardiyah. Spd. M. Pd	
4	Rabu 26 oktober 2016	Puji Astari	PMI	Rouf Tamim M,Pd	
5	Senin 23 Desember 2019	M. Hidayat	PMI	Fikih Satria S,kom M,Ti	

Bandar Lampung,
Ketua Jurusan PMI,

Dr.M.Mawardi J.M.Si
NIP. 196612221995031002